



Asking **Sensitive** Questions:

**Panduan Pelaksanaan Survei dengan Tema
Tindakan Ekstrem Berbasis Agama dan Non-Agama**



Buku Panduan

**Asking Sensitive Questions:
Panduan Pelaksanaan Survei dengan Tema
Tindakan Ekstrem Berbasis Agama dan Non-Agama**



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES

Centre for Strategic and International Studies

2019

Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
Jalan Tanah Abang 3 No. 23-27 Gedung Pakarti Center, Jl. Tanah Abang, RT.3/
RW.3, Petojo Selatan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10160

DAFTAR ISI

Pengantar Editor

Tim Penulis

Pengantar: Survei Opini Publik dan Counter-Violent Extremism v
Philips J. Vermonte

Overview Riset tentang Counter Violent Extremism vii
Hamdi Muluk

BAB I DEFINISI DAN KONSEP

1. **Violent Extremism dalam Sudut Pandang Antropologi** 1
Vidhyandika D. Perkasa
2. **Violent Extremism dalam Sudut Pandang Politik** 7
Djayadi Hanan
3. **Violent Extremism dalam Sudut Pandang Psikologi** 15
Hamdi Muluk
4. **Violent Extremism dalam Sudut Pandang Studi Agama** 19
Burhanuddin Muhtadi

BAB II PENGUKURAN DAN METODOLOGI

5. **Pengukuran dalam Penelitian Violent Extremism: Kendala dan Solusi** 29
Whinda Yustisia

BAB III MANAJEMEN SURVEI

6. **Sampling, Pelaksanaan, Analisis, dan Penulisan Laporan** 43
Deni Irvani
7. **Pengalaman Indonesia dalam Melakukan Riset Terkait Violent Extremism** 53
Arya Fernandes

DAFTAR TABEL

Tabel Kelebihan dan Kekurangan Format Respon Jawaban 37

TIM PENULIS

Philips J. Vermonte adalah Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)

Hamdi Muluk adalah Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)

Vidhyandika D. Perkasa adalah Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS

Djayadi Hanan adalah Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina

Burhanuddin Muhtadi adalah Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia dan Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Whinda Yustisia adalah Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan *Founder Sands Analytics Indonesia*

Deni Irvani adalah Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)

Arya Fernandes adalah Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS

PENGANTAR

Survei Opini Publik dan *Counter-Violent Extremism*

Philips J. Vermonte

Indonesia menghadapi situasi yang tidak mudah dalam mengurangi tindakan kekerasan ekstrem (*counter violent extremism*) berbasis agama dan perilaku intoleran terhadap kelompok minoritas. Dalam catatan *Freedom House* (2018), salah satu faktor penting yang memengaruhi penurunan rating demokrasi Indonesia pada skala global adalah tingginya angka diskriminasi pada kelompok yang berbeda dan minoritas. Survei opini publik mengenai hal ini menjadi penting karena dapat menjadi bahan bagi pembuat kebijakan untuk mendiagnosis potensi munculnya tindakan kekerasan ekstrem atau mengevaluasi program-program moderasi dan deradikalasi.

Akan tetapi, melakukan survei mengenai pendapat publik terhadap motivasi, sikap, dan perilaku publik pada tindakan kekerasan dan non-kekerasan berbasis agama bukanlah hal mudah, mengingat topik ini sensitif dan beragam definisi serta standard pengukuran (*measurement*) yang berbeda. Karena itu, setiap penyelenggara survei atas tema ini selalu mengingatkan dirinya pada satu pertanyaan utama: apakah kita menanyakan hal yang benar (*asking the right question*)? Sebab, pertanyaan yang tidak tepat akan melahirkan kesimpulan yang salah dan mungkin akan menimbulkan kesalahpahaman dan memperumit persoalan. Buku ini berisi kumpulan tulisan yang ditulis oleh peneliti yang mempunyai pengalaman panjang dalam melakukan riset kualitatif dan kuantitatif. Secara teknis, buku ini dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu definisi dan konsep *violent extremism*, pengukuran dan metodologi, serta manajemen dan pengalaman Indonesia dalam melakukan survei terkait tema-tema *violent extremism*.

Buku ini lahir atas kerja sama antara Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Proses penulisan buku menjadi rangkaian kegiatan CSIS dan Persepi di tahun 2018, yang dimulai dari pelaksanaan konferensi internasional untuk membahas pendekatan baru dan pengalaman negara lain dalam mengukur *violent extremism*. Hasil konferensi tersebut lalu diuji coba dalam sebuah survei opini publik.

Dari sisi pengukuran, survei ini berbeda dengan survei bertema sama yang pernah dilakukan di Indonesia. Dalam survei ini, persepsi dan dukungan publik terhadap tindakan kekerasan diukur berdasarkan kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Sumber informasi dari peristiwa tersebut diambil dari sumber resmi, baik yang disampaikan oleh pelaku, otoritas resmi, maupun diberitakan oleh media massa utama. Pengukuran dilakukan dalam tiga tahap, di antaranya mengetahui tingkat pengenalan publik terhadap peristiwa kekerasan ekstrem dan mengetahui sikap publik terhadap motivasi dan cara tindakan kekerasan dan non-kekerasan.

PENDAHULUAN

Riset tentang *Counter-Violent Extremism*

Hamdi Muluk

Melakukan riset secara rutin dan periodik mengenai gejala ekstremisme kekerasan (*violent extremism*) sejatinya adalah sesuatu yang lumrah dan perlu dilakukan, paling tidak untuk beberapa alasan berikut.

Pertama, seberapa pun damai dan demokratisnya keadaan suatu negara saat ini, tidak ada jaminan bahwa negara itu kebal dan terbebas dari ancaman tindakan ekstremisme kekerasan di masa depan. Kendati fakta empiris di satu sisi menunjukkan bahwa semakin berhasil tingkat pembangunan negara berbasis demokratis, maka semakin kecil tingkat ekstremisme kekerasan (lihat: *Global Terrorism Database – START Project, 2013*). Namun, tetap saja ada potensi menguatnya ancaman ekstremisme kekerasan yang bersifat laten di balik setiap perilaku masyarakat, kelompok, dan individu yang tampak nyata. Hal ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa gejala ekstremisme kekerasan sebagian besar lebih banyak berada pada taraf motif (*motives*) dan sikap (*attitudes*) yang tidak terobservasi secara nyata (*publicly unobservable*). Diperlukan riset pada tataran motif dan sikap untuk mendeteksi kecenderungan ini.

Kedua, akan lebih baik bagi kita untuk meletakkan gejala ekstremisme kekerasan sebagai sebuah *outcome variable* dari serentetan variabel yang bisa kita klasifikasikan sebagai variabel penyebab langsung, variabel moderator, variabel mediator, serta variabel penyerta yang mempercepat timbulnya variabel *outcome* tersebut, atau dengan cara lain sebagai variabel penarik (*pull factors*) dan variabel pendorong (*push factors*). Memetakan seluruh variabel ini adalah tugas yang menantang dari riset ekstremisme kekerasan tersebut.

Ketiga, mengerti keterkaitan antarseluruh variabel tersebutlah yang akan menuntun kita pada usaha-usaha untuk mencegah timbulnya ekstremisme kekerasan tersebut, atau yang kita kenal sebagai *preventing violent extremism* (PVE) atau *counter violent extremism* (CVE).

Keempat, arti penting riset komprehensif mengenai *violent extremism* (VE) serta upaya pencegahannya terletak pada kenyataan bahwa banyak negara yang gagal ternyata adalah buah dari kegagalan pencegahan *violent extremism*, seperti yang terjadi di Irak dan Suriah.

Buku kecil ini dibuat dalam rangka mempersiapkan para peneliti yang tertarik untuk melakukan riset dalam bidang *violent extremism*. Empat pendekatan, yaitu Antropologi, Politik, Psikologi, dan studi Agama diajukan sebagai kerangka teoretik. Selain itu, kerangka metodologi berupa pengukuran dan teknik survei dan contoh kajian empiris yang pernah dilakukan di Indonesia melengkapi buku ini menjadi pegangan yang utuh. Meski berangkat dari perspektif teoretik yang berbeda-beda, keempat pendekatan ini sepakat bahwa pada hakikatnya *violent extremism* itu adalah persoalan “pengerasan” atau proses radikalisasi ideologi tertentu—yang sedemikian rupa menjadi problematik—karena menjustifikasi atau memperbolehkan pemakaian kekerasan dalam banyak bentuk (verbal, ekspresi, dan tindakan). Ideologi dalam hal ini dikonsepsikan sebagai satu kesatuan yang koheren dari keyakinan (*beliefs*), pikiran (*minds*), perasaan (*feelings*), nilai-nilai (*values*), sikap (*attitudes*), dan tindakan (*actions*), dan dengan sendirinya konstruk-konstruk ini sangat memungkinkan untuk diukur.

Violent Extremism **dalam Sudut Pandang Antropologi**



Oleh :
Vidhyandika D. Perkasa

Ada konsensus bersama dalam ilmu-ilmu sosial bahwa tema tentang *counter violent extremism* (CVE), atau secara konseptual dijabarkan ke dalam fenomena yang terkait radikalisasi dan terorisme, perlu dikaji secara multi-disipliner dan melibatkan berbagai macam jenis teori, seperti *social movement theory*, psikologi sosial, dan teori conversion (Borum, 2011). Di sini peran ilmu antropologi sangatlah penting. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari pengalaman manusia, yakni ketika pola perilaku masyarakat (atau dikenal dengan budaya) dipelajari. Menurut seorang antropolog yang fokus pada masalah VE, Scott Atran, ‘salah satu kekurangan dalam pendekatan CVE adalah tidak ada orang yang mempelajari masalah ini secara mendalam (*in-depth*) dan di lapangan (*in the fields*)’ (Atran dalam Deloughery, *et.al*, 2016).

Kekuatan ilmu antropologi dalam studi CVE terkait dengan metodologi etnografinya, di mana masyarakat akar rumput (*grass-roots*) dijadikan subjek penelitian. Menurut Sluka (2008), dalam studi tentang *state terrorism* dan resistensi masyarakat di level akar rumput, ilmu antropologi paling tidak telah membawa tiga perspektif yang penting tentang terorisme.

Pertama, para antropolog yang telah bekerja di daerah konflik telah belajar tentang kekerasan, teror, dan penolakan. Mereka telah menuliskan etnografi dari masyarakat lokal bersenjata (*armed indigenous*), gerakan etno-nasionalis, dan religio-nasionalis yang sekarang dikenal dengan teroris. Ilmu Antropologi menawarkan suatu pendekatan atau perspektif yang berbeda tentang bagaimana memahami atau mendefinisikan ‘teroris’, suatu proses

mendekonstruksikan definisi teroris yang biasanya diintrodusir oleh negara, proponennya, dan media.

Kedua, biasanya setiap orang atau kelompok nasionalis yang melawan opresi dari negara selalu dikategorikan oleh negara sebagai orang barbar (*savages*) dan teroris, padahal secara objektif mereka bukan. *Ketiga*, para antropolog telah menerapkan konsep andalan mereka, yaitu 'budaya' ke dalam wacana debat. Mereka mengembangkan model konseptual yang baru tentang terorisme negara yang berkembang menjadi budaya teror (*culture of terror*) di mana ketakutan (*fear*) menjadi suatu hal yang normal dari kehidupan politik di masyarakat dan secara kritis melakukan suatu dekonstruksi tentang definisi terorisme dan bagaimana konsep tersebut diaplikasikan ke dalam kehidupan kita saat ini.

Menurut Sluka (2008), dalam memahami fenomena terorisme, para antropolog menawarkan dua pendekatan, yaitu objektif dan subjektif. Pendekatan objektif melihat terorisme sebagai realitas sehari-hari, dan berusaha untuk memahami fakta yang nyata tentang terorisme (*seeing is believing*). Terorisme didefinisikan sebagai pemakaian kekerasan terhadap masyarakat sipil untuk mendatangkan ketakutan sebagai bagian dari kontrol politik dan intimidasi.

“ Ilmu antropologi berada dalam posisi yang strategis untuk memberikan kontribusi pada bidang ini dengan cara mengekspos basis sosio-kultural dari kekerasan berbasiskan ekstremisme.”

Adapun pendekatan subjektif melihat terorisme sebagai konstruksi sosial atau politik (*believing is seeing*). Orang tidak bertindak berdasarkan apa yang nyata atau benar, tetapi pada apa yang mereka percayai itu nyata atau benar. Definisi terorisme juga bersifat kontekstual yang dipahami bahwa seorang teroris adalah pejuang kemerdekaan orang lain (*one person terrorist is another person's freedom fighter*). Dalam hal ini relativist atau postmodernist biasanya mengambil posisi di sisi yang subjektif di mana *believing is seeing*. Sementara para antropolog klasik memakai pendekatan campuran objektif dan subjektif (universal/partikular).

Dapat disimpulkan, pesan moral dari keterlibatan para antropolog dalam studi tentang terorisme membawa pengertian bahwa kita harus kritis dalam memahami konsep terorisme karena secara kontekstual terorisme sering dipakai sebagai senjata propaganda yang biasanya akan diikuti oleh meningkatnya terorisme yang diinisiasi negara sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Studi CVE dengan penekanan pada terorisme mengandung relativitas, subjektivitas, dan etnosentrisme.

Di sisi lain peran antropolog juga dianggap penting untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kaitan antara agama dan kekerasan (Kitts, Juergensmeyer, dan Jerryson, 2013). Fokus studinya adalah melihat bagaimana agama dan kekerasan dipahami secara antropologis. Antropolog Pamela J. Stewart dan Andrew Starthern mengembangkan beberapa pendekatan terhadap agama yang diambil dari karya Emile Durkheim melalui *cognitive theory of mind*, mengeksplorasi secara budaya *interplay of imagination*, sebagai contohnya proses *divinatory* yang melegitimasi perang dan perburuan dukun.

Antropolog juga memberi sumbangan pemikiran tentang proses radikalisis ke VE. Para antropolog mengkritik lemahnya definisi tentang radikalisis. Diperlukan upaya untuk memahami radikalisis yang dilihat sebagai suatu proses yang beragam. Mereka berpendapat bahwa radikalisis dapat memfasilitasi perilaku yang terkait terorisme atau dikenal dengan RVE (*radicalization into violent extremism*) (Borum, 2011).

Di sisi lain, para antropolog juga tertarik untuk melihat bagaimana peran masa kecil (*childhood*) individu yang melakukan perilaku kekerasan dan radikal. Dengan kata lain, antropolog ingin mencari jawaban mengapa militansi dan radikalisis direpresentasikan oleh banyak sekali orang muda. Jadi ilmu antropologi berada dalam posisi yang strategis untuk memberikan kontribusi pada bidang ini dengan cara mengekspos basis sosio-kultural dari kekerasan berbasiskan ekstremisme. Pada akhirnya, temuan ini akan sangat berguna untuk merancang program untuk memitigasi aksi ekstremisme dan memperkuat kohesi dan ketahanan sosial di masyarakat (Ensor, 2017).

Menurut Ensor (2017), ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi pemuda melakukan aksi VE. *Pertama*, dengan mengambil pengetahuan dari ilmu psikologi, ada kaitan dengan perkembangan saraf yang membentuk kognitif seseorang secara biologis sehingga lebih rentan terhadap ideologi

yang berlandaskan ekstremisme. *Kedua*, radikalisasi terkait dengan keretakan rumah tangga sehingga individu atau pemuda tersebut gagal mendapatkan nilai-nilai berharga yang membentuk 'self-esteem'-nya. *Ketiga*, terkait dengan suatu komunitas di mana sub-kulturnya telah hancur atau mengalami kemunduran secara historis, politik, dan sosio-ekonomi sehingga menghasilkan rasa teralienasi dan mereka lebih rentan terhadap pengaruh yang radikal.

Temuan dari Ensor di atas diperkuat oleh seorang antropolog yang bernama Scott Atran. Atran tertarik melihat transisi pemuda dari penganut ideologi radikal hingga menjadi anggota kelompok VE. Menurut Atran, secara horizontal pemuda menjadi radikal karena pengaruh teman, dibandingkan dengan secara vertikal yang dipengaruhi oleh pemimpin suatu institusi/kelompok tertentu. Proses rekrutmen juga dilakukan secara *bottom-up*. Mereka berasal dari pemuda yang marginal dan teralienasi yang tidak saja mencari teman, penghargaan, dan makna, tetapi juga perasaan asyik untuk bisa berperang melawan negara yang dianggap superpower (Atran, dalam Ensor, 2017).

Di sini, ruang lingkup peran para antropolog sangat luas, seperti yang telah diteliti oleh John Venhaus (2010) tentang keterlibatan pemuda di jaringan Al-Qaeda. Venhaus telah memberikan sumbangan yang berharga tentang 'konteks lokal' yang memengaruhi seorang individu mendukung VE. Tema-tema lain yang dapat dikaji para antropolog adalah mengidentifikasi basis kultural VE dan radikalisasi, faktor-faktor yang memotivasi individu dan kelompok ke VE, dan peran teknologi dan media sosial dalam propaganda wacana ekstremisme (Ensor, 2017).

Para antropolog dapat mengidentifikasi 'faktor-faktor risiko dan konteks', baik secara global maupun lokal, yang mendorong anak-anak dan pemuda melakukan VE. Terlepas dari sisi negatif dari peran anak-anak dan pemuda dalam VE, secara positif mereka dapat juga menjadi aktor penting untuk membangkitkan ketahanan dalam masyarakatnya dan membantu mengidentifikasi praktik baik untuk mempromosikan rehabilitasi dan integrasi sosial dari anak-anak dan pemuda dalam aksi VE (Ensor, 2017).

Para pemuda tidak lagi menjadi objek, tetapi juga subjek studi. Artinya, pemuda tersebut dilibatkan dalam upaya mengidentifikasi masalah dan keinginan mereka, baik terkait opresi atau marginalisasi politik, masalah

ekonomi, trauma terhadap kekerasan, maupun masalah yang terkait dengan identitas dan eksklusi sosial (Atran, dalam Ensor 2017).

Selain permasalahan di atas, dari wacana tentang VE yang berkembang adalah rasa tidak percaya (*distrust*) dari pihak terkait, misalnya komunitas Arab, penegak hukum, ataupun pemerintah negara setempat karena pemahaman budaya (*cultural awareness*) dan bahasa yang kurang. Di sini ilmu antropologi dapat berperan menjembatani rasa tidak percaya atau fenomena *cultural dissidence* ini, misalnya melalui pembelajaran tentang retorika keagamaan yang radikal, studi tentang mobilisasi agama dan gerakan sosial dan nasionalisme agama, dan lain sebagainya (Deloughery, *et.al*, 2016). Kekuatan dari antropologi terletak pada kemampuannya memahami lingkungan yang tidak stabil terkait VE.

Keunggulan antropologi dalam studi CVE adalah kemampuannya membuat komparasi lintas budaya dan disiplin melalui (Deloughery, *et.al*, 2016: 7-8; 7-9):

1. Kemampuan membuat evaluasi alat-alat monitoring yang digunakan dalam program *counter-terorisme*.
2. Kemampuan membuat *outline* kerangka yang inter-disiplin untuk menilai tingkat kerentanan pemuda di beberapa konteks budaya.
3. Memberikan observasi dan analisis tentang kekerasan negara
4. Kemampuan membuat suatu studi kasus yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah berdasarkan studi lapangan.
5. Memberikan kerangka antropologis untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor sistemik dan kultural yang menumbuhkan teroris dan VE.
6. Memberikan analisis tentang agama dan kekerasan.
7. Memberikan analisis etnografis bagaimana seseorang dapat keluar dari kelompok ekstremis.
8. Memberikan konsepsualisasi dari kekerasan teroris '*lone-wolf*' melalui lensa masyarakat, budaya, dan agama.

Dengan demikian, ilmu Antropologi menawarkan pandangan berharga tentang motivasi historis dan kultural organisasi VE tertentu; dan para antropolog memiliki bekal untuk memberikan studi lapangan ilmiah tentang kelompok VE.

Daftar Pustaka

- Ensor, Marisa O. (2017). *Childhood and the Anthropology of Violent Radicalization*. Researchgate: Anthropology of Children and Youth Interest Group.
- Venhaus, John M. (2010). *Why Youth Join al-Qaeda*. United States Institute of Peace Special Report. Washington DC.
- Deloughery, Kathleen, Ross Owens, Jonatan evans, Jennifer Foley, dan Ji Sun Lee. (2016). *Countering Violent Extremism-Developing a Research Roadmap: Literature Review*. RTI International.
- Sluka, Jeffrey. (2008). *Terrorism and Taboo: An Anthropological Perspective on Political Violence Against Civilians*. *Critical Studies on Terrorism*. Vol 1 No 2, August 2008, 167-183.
- Kitts, Margo, Mark Juergensmeyer dan Michael Jerryson. (2013). *Introduction; The Enduring Relationship of Religion and Violence. The Oxford Handbook of Religion and Violence*. Edited by Michael Jerryson, Mark Juergensmeyer dan Margo Kitts.
- Borum, Randy. *Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories*. *Journal of Strategic Security* Vol 4 Number 4 Winter 2011.

Violent Extremism **dalam Sudut Pandang Politik**



Oleh :

Djayadi Hanan

Pengertian *Violent Extremism* (VE)

Ekstremisme kekerasan (VE) sering kali dikonseptualisasikan secara berganti-ganti dengan radikalisasi (*radicalisation*) dan terorisme. Agar tidak menimbulkan kebingungan, ketiga istilah tersebut, meskipun mirip dan saling berhubungan, haruslah dibedakan dengan cukup tegas (Striegheer, 2015).

VE adalah suatu ideologi (ism) sehingga ia merupakan formulasi ide yang berisi cara pandang tertentu tentang realitas (dunia) dan bagaimana seharusnya realitas itu. Karena itu, VE tidak hanya berupa tindakan kekerasan yang bersifat fisik. Kebanyakan definisi tentang VE memasukkan tindakan teror (kekerasan fisik) sehingga sering kali rancu dengan istilah terorisme (Striegheer, 2015: 79). Sebagai sebuah ideologi, definisi umum VE yang dapat dipakai adalah suatu ideologi yang menganut dan atau menganjurkan penggunaan kekerasan (*violence*) dalam mencapai suatu tujuan sosial, rasial/etnis, religius (keagamaan), dan atau politik.

Ekspresi dari ideologi ini bisa berupa pendapat, sikap, maupun tindakan nyata, mulai dari pernyataan atau ucapan yang bersifat kekerasan hingga tindakan kekerasan seperti teror. Ekspresi VE bersifat radikal dalam opini, terutama soal-soal politik, dengan karakter utama intoleransi terhadap kepentingan yang bertentangan dengannya dan terhadap perbedaan pendapat (Southers, 2013). VE terjadi ketika individu atau kelompok secara

terbuka mengekspresikan atau menyatakan keyakinan ideologis mereka melalui penggunaan kekerasan atau anjuran penggunaan kekerasan.

Tentang radikalisasi, definisi yang secara umum lebih diterima adalah suatu proses di mana sistem keyakinan dan ideologi seseorang berubah dari waktu ke waktu (Taylor and Horgan, 2006) dari yang sifatnya *mainstream* dan moderat menuju ke keyakinan dan ideologi yang ekstrem (Smith, 2009). Meskipun tidak serta-merta, melalui proses ini, penggunaan kekerasan juga sering kali mulai diterima sebagai jalan untuk mewujudkan atau memperjuangkan keyakinan dan ideologi ekstrem tersebut.

Konseptualisasi mengenai terorisme juga sangat beragam. Dari kajiannya, Striegher (2015) menyimpulkan bahwa hampir semua definisi tentang terorisme mendeskripsikan terorisme sebagai tindakan atau ancaman tindakan, penggunaan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan politik, religius, dan ideologi.

Dengan melihat ketiga konseptualisasi tersebut, jelas bahwa VE, radikalisasi, dan terorisme memiliki hubungan yang erat. Namun, jelas pula bahwa terorisme tidak identik dengan VE karena terorisme hanyalah salah satu kemungkinan bagaimana VE dimanifestasikan dalam tindakan. Radikalisasi adalah proses yang bisa membuat individu atau kelompok mengadopsi VE dan atau terorisme, meskipun tidak selalu, karena radikalisasi bisa saja hanya sampai pada ekstremisme tanpa adanya kekerasan dan atau tindakan/kegiatan teror. Ekstremis adalah orang yang ide-ide dan tindakannya dipandang berada di luar *mainstream* atau di luar kelaziman, tapi tidak mesti sesuatu yang jahat. Ia menjadi masalah ketika ia bersifat intoleran dan kekerasan (Wintrobe, 2006).

VE dalam Konteks Politik

konteks politik, *violent extremism* (VE) terkait dengan dua hal. *Pertama*, VE yang bersifat politik atau yang tujuannya politik. Ekstremisme ini bisa dianut dan dilakukan oleh individu dan kelompok. VE yang bersifat politik atau tujuannya politik adalah keyakinan, sikap, kemauan, dan tindakan untuk merebut dan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara kekerasan atau mendorong penggunaan kekerasan. Kekerasan yang terjadi atau didorong bisa bersifat non-fisik (seperti kekerasan verbal semacam ujaran kebencian/*hate speech*) dan bersifat fisik (seperti aksi atau tindakan teror).

VE yang bersifat atau bertujuan politik ini dapat disamakan dengan ekstremisme politik (*political extremism*) yang dapat dikonseptualisasikan sebagai kemauan untuk berkuasa dengan menggunakan gerakan sosial atau mobilisasi sosial melalui program politik yang bertentangan dengan otoritas negara, dan untuk tujuan tersebut kebebasan individu dapat dikorbankan demi tujuan bersama, termasuk dengan cara melakukan pembunuhan/kekerasan massal terhadap para penentang program politik tersebut (Midlarsky, 2011: 7).

Dalam konteks politik yang lebih formal, VE dapat dianut oleh partai politik

ekstrem (*extremist political party*). Menurut Down (2012), partai politik ekstrem adalah partai yang menginginkan perubahan mendasar dalam masyarakat, baik berdasarkan sesuatu yang ideal di masa depan maupun kembali ke masa lalu yang dianggap ideal (*idealized past*) dengan cara yang bertentangan dengan kesepakatan umum tentang kebijakan-kebijakan dasar suatu negara. Dengan kata lain, proposal atau program yang diajukan partai ekstrem sangat berbeda, bahkan bertentangan, dengan partai-partai lainnya dalam suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, partai politik ekstrem dapat menganjurkan atau melakukan penggunaan kekerasan, terutama terhadap lawan politik yang merintanginya.

Aktor yang melakukan VE yang bersifat politik atau bertujuan politik dapat berasal dari negara (institusional) dan berasal dari masyarakat (non-institusional). Apabila seorang pemegang kekuasaan berasal dari

“**VE yang bersifat atau bertujuan politik ini dapat disamakan dengan ekstremisme politik (*political extremism*) yang dapat dikonseptualisasikan sebagai kemauan untuk berkuasa dengan menggunakan gerakan sosial atau mobilisasi sosial melalui program politik yang bertentangan dengan otoritas negara, dan untuk tujuan tersebut kebebasan individu dapat dikorbankan demi tujuan bersama, termasuk dengan cara melakukan pembunuhan/kekerasan massal terhadap para penentang program politik tersebut.”**

— (Midlarsky, 2011:7) —

penganut VE, maka sangat mungkin terjadi tindakan VE terhadap lawan-lawan politiknya maupun terhadap masyarakat yang dianggap tidak dapat dikendalikan. Aktor seperti ini akan mencari individu-individu yang dianggap merintangi programnya lalu menggunakan aparat negara untuk melakukan tindakan VE. Sebaliknya, aktor yang berasal dari masyarakat dapat melakukan tindakan VE terhadap negara, misalnya dalam bentuk teror, atau terhadap masyarakat lainnya, secara individu maupun kelompok.

Penyebab VE yang bertujuan politik bisa bermacam-macam, mulai dari ideologi kekerasan, persoalan psikologis, persoalan politik, persoalan identitas, hingga persoalan-persoalan lainnya. Faktor-faktor penyebab VE secara umum dapat dimasukkan sebagai penyebab VE yang bersifat politik juga. Apalagi, biasanya sulit memisahkan VE yang tidak bertujuan politik atau bermuatan politik dengan yang tidak.

Menurut United Nations on Drugs and Crime (UNODC, 2018), faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya VE dapat dikategorikan menjadi dua jenis. *Pertama, push factor* atau faktor yang mendorong, yakni kondisi-kondisi yang kondusif bagi VE dan konteks struktural yang memungkinkan VE muncul. Termasuk di dalam faktor-faktor ini adalah kurangnya kesempatan sosial-ekonomi (termasuk masalah kemiskinan), marginalisasi dan diskriminasi, pengelolaan pemerintahan yang buruk, pelanggaran hak asasi manusia dan hukum, konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan, dan proses radikalisisasi.

xFaktor pendorong dapat juga disebut sebagai faktor-faktor struktural yang ada atau terjadi di masyarakat, sedangkan faktor penarik adalah faktor psikologis yang memungkinkan seseorang atau suatu kelompok menjadi lebih rawan terpengaruh untuk melakukan tindakan-tindakan VE (Nanes dan Lau, dikutip UNODC, 2018).

VE dalam konteks politik yang kedua adalah soal akar atau sebab-sebab (*root-causes*) politik dari *violent extremism*. Para peneliti mengenai ekstremisme kekerasan sudah lama mengidentifikasi berbagai sebab adanya atau terjadinya VE. Salah satu sebab yang penting adalah sebab yang terkait dengan politik.

Sebab politik yang pertama adalah ideologi politik. Ini berupa keyakinan atau pandangan bahwa sistem politik yang ada tidak benar/absah atau pihak yang berkuasa tidak absah dan harus digantikan oleh ideologi yang mereka yakini. Ideologi ini ada dua jenis, yakni yang dimotivasi oleh rasa kesukuan atau etnis sehingga sifatnya lokal/nasional. Yang kedua berpandangan

bahwa sistem politik atau tata dunia harus diubah sesuai keyakinan mereka sehingga bersifat atau memiliki gerakan yang cakupannya global.

Beberapa yang bisa masuk ke dalam kategori ini adalah ideologi separatisme berbasis suku atau etnis yang tujuannya memisahkan diri dari negara dan ideologi antidemokrasi. Ideologi antidemokrasi dari kelompok ISIS, misalnya, beranggapan bahwa demokrasi adalah sistem yang bertentangan dengan Islam dan harus diubah sekalipun dengan cara kekerasan. Ideologi ultranasionalis di beberapa negara di Eropa, misalnya, sering kali memprovokasi tindakan kekerasan terhadap kelompok imigran. Demikian juga dengan ideologi bangsa kulit putih kelompok Ku Klux Klan (KKK) di Amerika Serikat.

Sebab politik VE yang kedua adalah kekecewaan yang sangat dalam (*grievance*) terhadap sistem politik atau perlakuan politik dari negara/penguasa. Faktor kekecewaan mendalam sudah lama diidentifikasi sebagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya VE, terutama dalam situasi konflik. Rasa kecewa yang paling banyak muncul adalah yang bersifat politik dan ekonomi.

Sejumlah kekecewaan mendalam yang bisa diidentifikasi adalah diskriminasi politik, marginalisasi politik, rasa marah yang memuncak akibat persepsi bahwa saudara seagamanya (muslim) dikorbankan seperti di Palestina, pelanggaran hak asasi manusia, dan intervensi kekuasaan asing di suatu tempat atau negara. Sebagai contoh, VE bisa terjadi akibat diskriminasi politik terhadap etnis Rohingya yang tidak diakui kewarganegaraannya. VE bisa berlangsung dua arah, dari masyarakat yang mengalami diskriminasi dan dari penguasa yang

“Sebab politik VE yang kedua adalah kekecewaan yang sangat dalam (*grievance*) terhadap sistem politik atau perlakuan politik dari negara/penguasa.”

melakukan diskriminasi sehingga ia menjadi siklus kekerasan yang seperti tidak berakhir. Apabila satu kelompok merasa termarginalkan akibat keberpihakan penguasa/negara terhadap kelompok tertentu, bisa menimbulkan kecewa sebagai marginalisasi politik. Konflik dan terajahnya bangsa Palestina menimbulkan rasa simpati dan akhirnya rasa marah dari berbagai kelompok muslim di berbagai belahan dunia sehingga sejumlah kelompok menganut dan mengekspresikan VE.

Kekecewaan mendalam bisa bersifat historis, bisa juga bersifat kontemporer. Terjadinya

kekerasan antarkelompok Hindu dan muslim di India misalnya, bisa ditelusuri ke era ketika muslim belum sampai di India. Demikian juga dengan kekecewaan mendalam bangsa Moro di selatan Filipina yang merasa tanah dan kemerdekaan mereka dirampas sehingga mendorong sejumlah kelompok melakukan VE. Bisa juga ini bersumber dari peristiwa kontemporer, misalnya kebijakan sejumlah negara Barat terhadap imigran dari etnis atau agama tertentu bisa memunculkan tindakan pembalasan dalam bentuk VE.

Sebab politik VE yang lain adalah politisasi: VE dianggap mendatangkan keuntungan politik sehingga dieksploitasi oleh para pelaku politik untuk memperoleh keuntungan, baik keuntungan politik maupun lainnya, baik dalam situasi kompetisi politik, konflik politik, maupun lainnya.



Studi yang dilakukan Steven Wilkinson (2006) tentang kekerasan antara muslim dan Hindu di India adalah contoh bagus soal politisasi ini. Menurut Wilkinson, kekerasan dan kerusuhan yang sering terjadi antara muslim dan Hindu di India diakibatkan oleh ada atau tidak adanya insentif politik bagi para politisi bila VE terjadi.

Tersedianya *insentif electoral* adalah faktor yang menentukan di mana kekerasan atau VE akan terjadi dan apakah pihak pemerintah setempat akan mencegahnya atau tidak. Politisi di tingkat lokal dan di tingkat yang lebih tinggi, dalam kondisi tertentu, akan memiliki insentif politik untuk memprovokasi kerusuhan atau kekerasan dan apakah akan membiarkan bila telah terjadi kekerasan. Bila dikombinasikan dengan tersedianya ideologi politik yang mengadopsi VE, maka insentif politik untuk kekerasan ini akan bekerja dengan baik.

Selanjutnya, sebab politik VE dapat pula berupa krisis/konflik politik, baik di tingkat lokal maupun di tingkat internasional/global. Konflik dan instabilitas politik yang berkepanjangan, seperti yang terjadi di Timur

Tengah dan negara-negara Afrika Utara, misalnya telah lama diidentifikasi sebagai salah satu pendorong utama munculnya VE (Lombardi, *et.al*, 2015). Konflik tersebut menarik banyak kalangan muda untuk ikut terlibat karena mereka menganggapnya sebagai bagian dari jihad. Tindakan VE yang mereka lakukan di wilayah-wilayah konflik tersebut selanjutnya bisa dibawa ke wilayahnya ketika mereka kembali.

Para “pejuang” ini berpindah-pindah dari satu wilayah konflik ke wilayah lainnya, dan pada akhirnya masuk kembali ke negara atau wilayah asal mereka. Ketika mereka kembali ke tempat asal inilah kemudian mereka dapat menjadi ancaman potensial untuk munculnya VE. Di sejumlah negara Eropa (anggota NATO) misalnya, ada kekhawatiran yang serius terhadap para kombatan yang kembali dari daerah-daerah konflik karena ditemukan fakta-fakta bahwa mereka merekrut anak-anak muda dan melibatkannya dalam serangan-serangan terorisme di tingkat lokal (Lombardi, *et.al.*, 2015).

Proses radikalisisasi politik dapat pula disebut sebagai salah satu sebab politik dari VE. Radikalisisasi politik, menurut Cauley and Moskalenko (2008), adalah meningkatnya persiapan dan komitmen terhadap konflik antarkelompok. Ini berarti peningkatan waktu, dana, pengambilan risiko, dan kekerasan dalam rangka mendukung suatu perjuangan politik (*political cause*). Masih menurut Cauley and Moskalenko (2008), karena setiap perjuangan politik itu selalu terkait dengan kelompok tertentu yang memang peduli dengan perjuangan tersebut, radikalisisasi perilaku politik dapat juga disebut sebagai peningkatan penyediaan waktu, dana, pengambilan risiko, dan kekerasan untuk mendukung suatu kelompok politik.

Radikalisisasi politik ini terkait dengan individu dan kelompok. Di dalam kelompok tingkat radikalisisasinya berbeda-beda. Ia dapat digambarkan seperti model piramid (Cauley and Moskalenko, 2008). Di puncak piramid adalah yang paling radikal, di basis piramid adalah semua orang dan anggota kelompok yang bersimpati terhadap perjuangan politik kelompok tersebut. Dari basis menuju puncak piramid ditandai dengan berkurangnya jumlah individu, tapi dibarengi dengan peningkatan tingkat radikalisisasi tentang keyakinan, perasaan, dan perilaku. Yang berada di puncak piramid inilah yang bisa diasumsikan paling siap melakukan VE, baik dalam pengertian verbal maupun tindakan fisik kekerasan.

Daftar Pustaka

- Down, William M. (2012). *Political Extremism in Democracy: Combating Intolerance*, New York: Palgrave Macmillan.
- Lombardi, Marco. *et.al.* (2015). *Countering Radicalisation and Violent Extremism Among Youth to Prevent Terrorism*, The Nato Science for Peace and Security Programme, IOS Press.
- McCauley, Clark, dan Sophia Moskalenko (2008). "Mechanisms of Political Radicalization: Pathways Toward Terrorism," *Terrorism and Political Violence*, 20:3, 415-433, DOI: 10.1080/09546550802073367.
- Midlarsky, Manus I. (2011). *Origins of Political Extremism: Mass Violence in the Twentieth Century and Beyond*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, A. (2009). *Radicalization- A Guide for the Perplexed (National Security Criminal Investigations, Trans)*, Royal Canadian Mounted Police.
- Southers, E. (2013). *Homegrown Violent Extremism*, Oxford: Elsevier Inc.
- Striegher, Jason-Leigh. (2015). "Violent-extremism: An examination of a definitional dilemma," *The Proceedings of the 8th Australian Security and Intelligence Conference*, held from the 30 November-2 December, 2015 (pp. 75-86), Edith Cowan University, Perth, Western Australia.
- Taylor, M., & Horgan, J. (2006). "A Conceptual Framework for Addressing Psychological Process in the Development of the Terrorist," *Terrorism & Political Violence*, 18(4), pp. 585-601.
- UNODC. (2018), *Drivers of Violent Extremism*, Available at: <https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-2/key-issues/drivers-of-violent-extremism.html> (diakses 8 November 2018).
- Wilkinson, Steven I. (2006). *Votes and Violence, Electoral Competition and Ethnic Riots in India*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Wintrobe, Ronald. (2006). *Rational Extremism: The Political Economy of Radicalism*, Cambridge: Cambridge University Press.

Violent Extremism **dalam Sudut Pandang Psikologi**



Oleh :

Hamdi Muluk

V*iolent extremism* atau dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan sebagai ekstremisme kekerasan, yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan atau tingkah laku kekerasan yang berada pada tingkat yang sangat ekstrem yang rentangnya sangat luas, mulai dari penculikan, penyerangan, pembunuhan, kerusuhan etnik, pembantaian massal, sampai ke tindakan terorisme dalam bentuk pengeboman.

Secara umum, ekstremisme kekerasan biasanya dilatarbelakangi oleh motif ideologi yang bersifat radikal, baik itu ideologi berbasis keagamaan, politik, kesukuan, ataupun ideologi-ideologi lain, seperti gender, lingkungan dan sebagainya. Tidak ada masyarakat, komunitas, ataupun negara yang kebal terhadap ekstremisme kekerasan ini. Ia bisa terjadi kapan saja, di mana saja, tergantung apakah terdapat faktor-faktor psikologik, ekonomi, sosial-politik, dan institusional yang kondusif untuk memunculkan tingkah laku tersebut.

Dalam ilmu psikologi, pengertian tingkah laku (*behavior*) mempunyai rentang yang sangat luas, mulai dari perilaku tidak terlihat nyata (*intangible*), seperti pikiran, perasaan, sikap-sikap, sampai ke perilaku nyata yang kelihatan wujudnya. Sepanjang tingkah laku itu bisa diukur, ilmu psikologi menganggap tingkah laku itu ada (*exist*). Dengan begitu tingkah laku yang kita bahas di buku ini yang disebut sebagai ekstremisme kekerasan dapat diukur di level keyakinan, perasaan, sikap-sikap, dan amatan terhadap perilaku nyata (*observable behavior*).

“Oleh karena ekstremisme kekerasan adalah hasil akhir dari proses radikalisisasi, maka mengerti bagaimana proses radikalisisasi itu terjadi adalah kunci untuk mencegah tindakan ekstremisme kekerasan tersebut.”

Pada domain tingkah laku yang tampil nyata (*observable behavior*), ekstremisme kekerasan bisa diidentifikasi sebagai tindakan yang dapat teramati (baik menurut pengakuan yang melakukan) maupun berdasarkan pengamatan orang lain terhadap aktor yang melakukan perbuatan tersebut untuk segala jenis tingkah lalu yang melukai, mencederai, meneror, memukul, membunuh, dan merusak objek-objek tertentu. Pada domain keyakinan dan perasaan, ekstremisme kekerasan dapat tampil dalam perasaan kebencian yang mendalam terhadap kelompok luar (*outgroup hate*), serta keyakinan-keyakinan yang membenarkan

pemakaian tindakan kekerasan ekstrem. Pada tataran sikap, ekstremisme kekerasan dapat tampil dalam sikap-sikap yang positif (pro ataupun suka) terhadap tindakan-tindakan kekerasan ekstrem, serta tidak suka (anti) terhadap tindakan-tindakan yang damai, demokratis, toleran yang bersifat keterbalikan dari tindakan ekstremisme kekerasan.

Oleh karena ekstremisme kekerasan adalah hasil akhir dari proses radikalisisasi, maka mengerti bagaimana proses radikalisisasi itu terjadi adalah kunci untuk mencegah tindakan ekstremisme kekerasan tersebut. Secara umum, tidak ada satu pola yang tunggal, pasti, dan bersifat tetap untuk menjelaskan mengapa seseorang, kelompok, ataupun masyarakat menjadi radikal. Ada banyak faktor penyebab dan pendorong untuk menjadi radikal. Secara umum faktor dan penyebab itu bisa dikelompokkan menjadi faktor pendorong (*push factors*), faktor penarik (*pull factors*), dan faktor kontekstual (*contextual factors*). Faktor pendorong (*push factors*) adalah segala sesuatu yang mendorong individu untuk menjadi radikal dan melakukan ekstremisme kekerasan, antara lain kehilangan makna diri (*loss of significant*), marginalisasi, diskriminasi, ketidaksetaraan, perasaan

ketidakadilan, perasaan terancam, deprivasi, dan pengabaian terhadap hak-hak asasi.

Faktor penarik (*pull factors*) dapat dikatakan sebagai sesuatu yang menarik atau mempunyai daya tarik bagi individu atau kelompok untuk bergabung ke kelompok-kelompok radikal. Dalam hal ini penyebaran dan propagasi ideologi dan ajaran-ajaran radikal dalam banyak bentuk menjadi daya tarik yang besar bagi orang untuk mengikutinya. Tawaran-tawaran ideologi bisa menjadi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang selama ini tidak didapat ketika belum bergabung dengan kelompok radikal.

Sementara faktor kontekstual (*contextual factors*) adalah konteks politik, ekonomi, dan sosial-politik yang menyuburkan atau sangat kondusif bagi munculnya perilaku ekstremisme kekerasan, di antaranya negara gagal (sistem yang gagal), baik sistem ekonomi, hukum, maupun sistem sosial lainnya. Negara-negara yang sedang dilanda konflik sosial adalah contoh faktor kontekstual yang menyuburkan tindakan ekstremisme kekerasan. Namun, bisa juga lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai faktor kontekstual kondusifnya ekstremisme kekerasan

Dengan cara yang hampir sama, penjelasan menguatnya radikalisme dan yang akan berujung pada ekstremisme kekerasan bisa dijelaskan dengan



melihat pada faktor-faktor penggerak ekstremisme kekerasan (*drivers of violent extremism*), dan sikap atau keyakinan (*attitudes and values*) yang kondusif terhadap munculnya tindakan tersebut.

Beberapa faktor penggerak yang dianggap penting: *pertama*, psikologis dan sosial, di antaranya adalah alienasi atau keterpinggiran sosial, kemarahan atau dendam karena faktor kehilangan orang yang dicintai, semangat berjihad, ketertarikan yang besar terhadap kelompok radikal. *Kedua*, penggerak berbasis identitas, segregasi atau lemahnya kohesi sosial karena polarisasi identitas, baik politik, agama, dan kesukuan, faksionalisasi elite politik berbasis politik identitas, diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Penggerak *ketiga* adalah penggerak politik (*political drives*), yaitu legitimasi sistem atau politik yang lemah, korupsi, eksklusivitas dari layanan negara, ketakutan dan atau fisik insekuri dari negara atau perlakuan buruk dari negara, dan pelanggaran HAM. Berikutnya adalah penggerak ekonomi (*economic drivers*), yaitu ketimpangan dan kemiskinan, pengangguran, serta akses ekonomi yang timpang.

Di luar faktor penggerak, beberapa sikap dan keyakinan (*attitudes and beliefs*) ditengarai menjadi dasar yang kondusif untuk bekerjanya faktor-faktor yang disebutkan di atas, di antaranya adalah fundamentalisme keberagamaan, termasuk juga ideologi jihad kekerasan, ideologi politik lain yang tertutup, intoleransi, sikap indoktriner dan otoritarian sayap kanan (*right wing authoritarianism*), dan kekakuan kognitif (*cognitive rigidity*).

Violent Ekstremism **dalam Sudut Pandang Studi Agama**



Oleh :

Burhanuddin Muhtadi

istilah ekstremisme yang berbau kekerasan (*violent extremism*) sebenarnya sangat problematik. Jika kita percaya ada *violent extremism*, berarti kita dengan sendirinya mengakui ada kelompok ekstremis yang tidak memakai kekerasan (*non-violent extremism*). Lantas, di luar masalah pemakaian instrumen kekerasan dalam mencapai tujuan, seberapa jauh perbedaan di antara kedua kelompok ekstremis tersebut? Apakah mereka memiliki pandangan dan ideologi yang sama?

Alex Schmid (2014: 14) membedakan antara (1) *non-violence* and (2) *not-violent*. *Non-violence* itu bukan semata-mata metode nirkekerasan, tapi menjadi semacam prinsip perjuangan damai, seperti yang dilakukan Mahatma Gandhi atau Martin Luther King. Metode *non-violence* ala Gandhi atau King ini tidak bersifat oportunistik, taktikal, atau tergantung situasi. Tidak seperti Hizbut Tahrir yang menolak metode kekerasan, tapi membolehkan penggunaan kekerasan saat mendapat momentum untuk mengambil alih kekuasaan (*istislam al-hukmi*) (Muhtadi, 2009: 630). Jika ada kelompok yang tidak memakai kekerasan, tapi melakukan “justifikasi” atau pembenaran atas kekerasan yang dilakukan orang lain, atau bahkan bersedia melakukan kekerasan jika ada kesempatan (*willingness*), maka mereka tidak bisa dikategorikan sebagai “*non-violence*”, tapi lebih tepat disebut “*not-now-violent*” (Schmid, 2014).

Secara umum, ekstremisme dalam Islam memiliki dua dimensi: *thariqah* (metode perjuangan, *manhaj*) dan *fikrah* (ideologi). Oleh karena itu, Ronald Wibtrope (2006: 84) membedakan ekstremisme menjadi tiga jenis: *pertama*,

metode perjuangannya ekstrem tapi ideologi (*fikrah*) tidak ekstrem; *kedua*, secara ideologis dan metodenya ekstrem; dan *ketiga*, tujuannya ekstrem tapi ditempuh dengan metode yang tidak ekstrem. Perlu dicatat, ekstremisme secara ideologis mencakup spektrum yang luas. Ekstrem pada satu hal bukan berarti ekstrem pada isu yang lain. Kaum Salafi misalnya memiliki gradasi yang luas.

Dalam tradisi Sunni, kelompok Salafi yang sering diasosiasikan dengan

kekerasan sekalipun terbagi menjadi tiga kelompok. Ada kelompok Salafi non-politik yang lebih *concern* masalah ibadah saja. Ada juga sayap politik Salafi yang biasanya diasosiasikan dengan Wahabi. Kelompok Salafi yang sering membetot perhatian luas adalah kelompok radikal yang tak segan menggunakan cara pandang ekstremnya melalui instrumen kekerasan.

Karena sulitnya mendefinisikan ekstremisme dan fakta bahwa istilah ekstremisme ini sering kali dipertukarkan dengan fundamentalisme atau radikalisme, maka kita perlu memahami apa yang dimaksud ekstremisme. Peter Coleman dan Andrea Bartoli mendefinisikan ekstremisme sebagai “[...] *activities (beliefs, attitudes, feelings, actions, strategies) of a character far removed from the ordinary*” (segala aktivitas [keyakinan, sikap, perasaan, tindakan, strategi] seseorang yang sangat berbeda dengan kebiasaan pada umumnya). Berdasarkan definisi ini, ekstremisme perlu dikontraskan dengan sesuatu yang *mainstream*, normal, atau moderat. Namun, Schmid (2014) mengingatkan, manusia pada umumnya mempunyai kecenderungan menilai bagian dari mayoritas. Akibatnya ada ekstremis yang tidak suka dikelompokkan sebagai “ekstremis”, dan malah menilai kelompok lain sebagai “ekstremis”. Ayman al-Zawahiri, pemimpin Al-Qaeda, menyatakan tidak sudi mendukung ISIS karena dianggap “terlalu ekstrem” (BBC News Middle East,

“**Ekstremisme ada tiga jenis: pertama, metode perjuangannya ekstrem tapi ideologi (*fikrah*) tidak ekstrem; kedua, secara ideologis dan metodenya ekstrem; dan ketiga, tujuannya ekstrem tapi ditempuh dengan metode yang tidak ekstrem.”**

~ Ronald Wibtrope (2006: 84) ~

3/2/2014). Kelompok mana pun enggan menyebut diri sebagai ekstremis atau fundamentalis. Sebutan ini adalah karakterisasi dari pihak luar.

Ekstremisme mengganggu tatanan dunia karena kaum ekstremis tidak hanya siap mati demi apa yang mereka yakini, tapi juga siap membunuh orang lain yang dianggap tidak mengikuti pandangan mereka. Menurut kaum ekstremis, dunia menjadi ajang peperangan kosmik antara yang *haqq* (baik) dan *bathil* (jahat); antara partai Allah (*hizb Allah*) versus partai setan (*hizb al-syaithan*). Dunia dibelah menjadi dua: *dar al-Islam* (*pax Islamica*) yang mewakili kebaikan versus *dar al-harb* (wilayah kafir yang harus diperangi).¹ Dalam pandangan mereka, orang kafir bisa saja tinggal di *dar al-Islam*, tapi harus menerima dan bersekutu dengan Islam. Pada titik ini, jihad menjadi jalan dalam memperluas *dar al-Islam* dan memerangi *dar al-harb*. Ekspansi *dar al-Islam* ini tak bisa dilepaskan dari misi ideologis menyiarkan agama Allah ke segala penjuru dunia.

Target jihad memang awalnya wilayah non-muslim dan misi utama mereka adalah menegakkan jalan Ilahi dengan metode kekerasan. Namun, bukan berarti jihad murni dari aspek material dan semata-mata karena motif agama saja. Montgomery Watt (1968: 14-18) misalnya mencium aroma duniawi di balik ekspansi *dar al-Islam* melalui instrumen jihad. Katanya, jihad merupakan kelanjutan dari *razzia*, ekspedisi militer (*ghazwah*) yang motif utamanya adalah perebutan rampasan perang. Menurut Watt, Perang Tours (Poitiers, Perancis) yang dimenangkan Charles Martel—dan menjadi akhir ekspansi pasukan muslim ke Eropa—lebih disebabkan oleh keengganan pasukan muslim sendiri yang merasa penetrasi ke jantung Eropa takkan menghasilkan rampasan perang yang signifikan yang sebanding dengan pengorbanan dan sumber daya yang harus mereka keluarkan.

Menurut Azyumardi Azra (1991), argumen Watt di atas mengasumsikan alasan material sebagai determinan utamanya. Watt lupa bahwa jihad memiliki landasan teologis yang menghunjam kuat dalam tradisi Islam. Ayat perintah jihad dalam pengertian *qital* (perang) bertebaran di Alquran. Jihad sebagai perang suci atas nama agama memiliki relevansi dengan doktrin bahwa agama dan negara adalah konsep yang tak terpisahkan (*al-diin wa al-dawlah*). Pendapat semacam ini sering kita temukan menurut ulama atau ideolog

¹ Mazhab Syafi'i menambahkan wilayah ketiga, yakni *dar al-shulh*, wilayah perjanjian damai, yakni non-muslim bisa melaksanakan hukum dan peraturan mereka, tapi mereka mempunyai perjanjian non-agresi dengan Islam (Azra, 1991: 78).

Salafi radikal seperti Ibn Taymiyyah, Abul A'la Maududi, Hassan al-Banna dan Sayyid Qutb. Bagi mereka, Islam adalah *al-diin*, yang bersifat *kaffah*, total, komprehensif, dan mencakup semua aspek kehidupan. Islam tidak memisahkan antara *aqidah wa syariah* (iman dan hukum), *diin wa dawlah* (agama dan negara), dan *diin wa dunya* (agama dan dunia). Fahmi Huwaydi, jurnalis Mesir, menyimpulkan bahwa Islam memerlukan negara, dan negara meniscayakan penggunaan kekerasan. Agar hukum Islam bisa dijalankan, maka berdirinya negara dan kepemimpinan islami menjadi prasyarat penting (*ittifaq al-jami' ala wujub al-imamah*) (dikutip dari Jansen, 1997: 6).

Ibn Taymiyyah, dalam kitab *al-Syiasah al-Syar'iyah fi Islah al-Rai' wa al-Rai'yyah* (1992), jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa kekerasan dan Islam adalah dua variabel yang identik karena pelaksanaan syariat Islam memerlukan kekuasaan politik. Jihad, dengan demikian, menjadi instrumen penegakan syariat. Perintah Allah yang menyerukan kebaikan dan menangkalkan kemungkaran (*amar makruf nahi munkar*) hanya mungkin dilakukan dengan supremasi politik. Karena sulitnya memisahkan agama dan politik dalam Islam, maka secara historis penggunaan justifikasi agama dalam politik yang profan menjadi tak terelakkan. Saking pentingnya jihad dalam konstruksi pemikiran Taymiyyah, jihad disandingkan dengan shalat sebagai soko guru agama. Ia mengatakan: “agama tanpa kekuasaan atau pemimpin (*sulthan*), jihad, dan harta (*maal*) sama buruknya dengan *sulthan*, harta, dan perang tanpa *diin* (agama).” Dalam tradisi Shiah atau Sunni, jihad adalah *fardhu kifayah*, kewajiban kolektif. Kaum Khawarij memasukkan jihad dalam pengertian ofensif sebagai Rukun Islam keenam yang tidak dapat ditinggalkan oleh seorang muslim baik secara individual maupun kolektif.²

Harus diakui makna jihad bersifat *contested* (diperebutkan). Makna jihad yang diartikan secara *letterlijk* dan sempit sekadar sebagai perang (*qital*) di atas hanyalah satu versi dalam tradisi Islam. Banyak juga ulama yang memaknai jihad secara moderat bahwa Islam bukanlah agama kekerasan dan jihad diartikan secara luas yang merangkum semua aktivitas. Sebagaimana dikutip dari Azra (1991: 81), Maududi, dalam karyanya *al-Jihad fi al-Islam* dan *al-Jihad fi Sabilillah*, membagi jihad dalam dua tujuan: *pertama*, defensif untuk melindungi diri dari serangan luar; *kedua*, ofensif dalam rangka mengoreksi kekuasaan yang tirani terhadap Islam. Hassan al-Banna (2007), pendiri al-

² Lebih jauh, baca juga Azyumardi Azra, *Jihad dan Terorisme: Konsep dan Perkembangan Historis*. Islamika No. 4 April-Juni 1991.

Ikhwan al-Muslimun, menolak tafsir jihad semata-mata perjuangan spiritual saja. Ia juga menolak asumsi bahwa seolah-olah perjuangan melawan hawa nafsu lebih tinggi statusnya ketimbang jihad sebagai perang. Justru seharusnya sebelum maju perang (*jihad al-asghar*), seorang mujahid harus mampu menundukkan hawa nafsu (*jihad al-akbar*) terdahulu. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kata al-Banna, jihad yang dijauhkan dari semangat berperang hanyalah tipu daya dari pihak asing dalam rangka melemahkan gairah keagamaan dan motivasi umat dalam berjihad. Sayyid Qutb, penerus al-Banna di Ikhwan, menuding tafsir lunak jihad yang dilucuti asosiasinya dengan perang sebagai bagian dari perang pemikiran (*al-ghazw al-fikr*) yang dilakukan musuh-musuh Islam. Dalam *Ma'alim fi al-Thariq* (2006), ia menyatakan bahwa jihad adalah sarana membangkitkan Islam dari keterpurukan melawan hegemoni Barat. Konspirasi Barat melalui modus *al-ghazw al-fikr* inilah yang dituding bertanggung jawab atas melemahnya spirit jihad yang berujung makin lemahnya posisi tawar umat Islam di hadapan Barat.

Kaum islamis, baik yang *violent* maupun *not-violent*, merasa tersubordinasi oleh Barat. “Trauma Islam modern,” ungkap Daniel Pipes (2000: 87-93), “muncul dari disparitas antara kesuksesan abad pertengahan dan kegagalan kini,” yang menyebabkan “perasaan lemah dan tidak berguna yang mengakar dalam dunia Islam dewasa ini.” Kaum islamis menganalogikan dengan gerhana yang menyelimuti Islam (*eclipse of Islam*). Mereka merasa “gerhana” ini

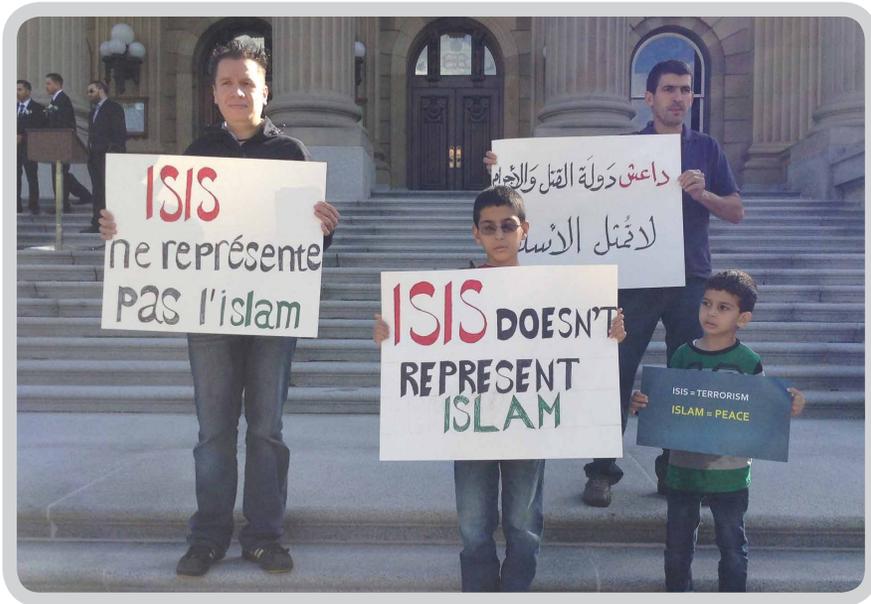
“**Ekstremisme mengganggu tatanan dunia karena kaum ekstremis tidak hanya siap mati demi apa yang mereka yakini, tapi juga siap membunuh orang lain yang dianggap tidak mengikuti pandangan mereka”**

disebabkan oleh lemahnya komitmen umat terhadap ajarannya sendiri dan malah tunduk pada isme-isme yang diimpor dari Barat, seperti sekulerisme, nasionalisme, dan modernisme. Islam, dalam pandangan mereka, seperti terasing (*ghuraba*) di kampung halaman sendiri. Qutb menuding umat Islam larut dalam jahiliah modern yang diciptakan Barat. Istilah jahiliah modern ini awalnya diperkenalkan Maududi pada 1939, tapi kemudian dipopulerkan Qutb dan disematkan kepada umat yang menjadikan modernitas sebagai barbaritas baru.

Untuk itu, kaum fundamentalis menyarankan umat agar *hijrah* dari jahiliyah modern ala Barat ke Islam sebagai pandangan hidup (*nizam syamil* atau *manhaj hayat*). Gagasan “Islam sebagai solusi” (*al-Islam huwa al-hal*) lalu ditawarkan agar terlepas dari imperialisme kultural Barat (Muhtadi, 2008). Slogan sejenis yang acapkali dipakai adalah, “*sharia is the solution*” (syariah adalah jalan keluar) atau “*the Qur’an is the constitution*” (Alquran adalah konstitusi) (Roy, 2012). Dalam prosesi *hijrah* ini, umat diminta kembali pada jalan yang telah digariskan dalam sumber-sumber rujukan Islam (*al-ruju’ ila al-Qur’an wa al-Hadits*). Konsep *hijrah* dari jalan musuh Allah (*a’da Allah*) menuju jalan Ilahi ini memiliki makna yang sangat penting dalam pandangan islamis radikal. Jika ada sebagian umat Islam yang enggan *hijrah* dari perangkap jahiliyah modern, maka label murtad dan kafir akan disematkan kepada mereka sehingga dianggap halal darahnya.

Kelompok Darul Islam dan Jemaah Islamiyah, misalnya, menuding pemerintah Republik Indonesia sebagai “jahiliyyah” karena tak bersedia menjalankan syariah secara kaffah (Pinardi, 1964, sebagaimana dikutip Mubarok dan Hamid, 2018). Ketika pemerintah menolak *hijrah* ke panji Islam, maka mereka berhak diperangi. Ini terkait dengan doktrin *hakimiyyah* yang dianut kuat di kalangan Salafi bahwa Allah itu berdaulat dan hukum-hukum-Nya harus diletakkan di atas segalanya (*la hukma lillah*). Dalam buku *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba’ashir* (Awwas, 2003), Ba’ashir menuding pemerintah Indonesia sekuler dan musyrik karena tidak menjalankan *Diin al-Islam* secara murni. Ba’ashir kemudian melakukan *takfir* (pengkafiran) yang memiliki implikasi serius terhadap mereka yang dikafirkan. Ba’ashir merujuk pendapat Shaikh Abdullah Azzam, kafir tak hanya melekat pada non-muslim saja, tapi juga pada presiden, anggota parlemen, intelektual, maupun umat Islam yang tunduk pada hukum selain syariat Allah. Ba’ashir berkata, “*siapa pun yang mengesahkan hukum yang tidak berasal dari Allah, maka ia telah menjadi kafir, keluar dari agama dari Islam dan bukan lagi bagian umat*” (Mubarok dan Hamid, 2018).

Inilah proses evolusi makna jihad menurut pandangan kaum ekstremis. Awalnya target jihad ditujukan kepada non-muslim atau *dar al-harb*. Pada perkembangannya, jihad juga ditujukan kepada kaum muslim yang dianggap melakukan “pelanggaran” berat. Kaum islamis radikal menggunakan jihad yang ditujukan kepada kaum muslim melalui instrumen *takfir* (pengkafiran). Bibitnya bermula dari Perang Riddah di masa Abu Bakar yang ditujukan



kepada kaum muslim yang menolak membayar zakat. Tapi dalam sejarah Islam, titik kulminasi jihad yang menasar umat Islam bermula dari periode kekacauan besar (*fitnah al-kubro*) yang memantik lahirnya kelompok Khawarij yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Mereka inilah yang pertama kali aktif melakukan takfir kepada umat Islam di luar kelompok mereka. Khawarij melakukan operasi *isti'radh*, semacam uji keimanan dan keislaman yang sering berujung pada eksekusi kepada umat Islam di luar kelompok mereka. Persis seperti perilaku ISIS yang tak segan memuncung muslim yang dianggap tak sesuai dengan jalan yang mereka pilih. Konsep takfir itu sendiri berasal dari Ibn Taymiyyah, yang kemudian dipopulerkan Qutb untuk menyebut pemerintahan yang diisi orang Islam tapi enggan menjalankan prinsip Islam. Kata Qutb, mereka yang lebih memilih jalan setan (*hizb al-syaithan*) ketimbang jalan Allah layak diperangi. Bukan hanya pemerintah, orang Islam yang lebih memilih jalan setan (dalam hal ini sekulerisme atau liberalisme) dan enggan memilih jalan Allah pun menjadi objek pengkafiran.

Doktrin ekstremis lainnya adalah *al-wala' wal bara'* (loyalitas dan pengingkaran). Doktrin ini mengharuskan mereka untuk cinta dan loyal hanya kepada kaum muslim yang dianggap lurus dan menyatakan antipati terhadap non-muslim. Kaum Salafi radikal merujuk pada surat Al-

Mumtahanah sebagai acuan teologis untuk membenci non-muslim. Ayat pertama surat ini turun dengan latar belakang cerita pengkhianatan sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Hatib bin Abi Balta'ah, yang membocorkan rencana Nabi SAW dan pasukan muslim menginvasi Mekkah ke suku Quraisy. Ini menjadi dasar larangan orang Islam membangun aliansi dengan non-muslim. Selain itu, kisah Hatib dijadikan dasar bahwa muslim yang bersekutu dengan musuh Islam berarti kafir, terlepas dari fakta bahwa Hatib membocorkan rahasia tadi karena khawatir keselamatan keluarganya yang tinggal di Mekkah dan fakta bahwa Hatib beberapa kali ikut jihad bersama Nabi SAW, termasuk dalam Perang Badar. Dalam praktiknya, doktrin *al-wala' wal bara'* ini menjadi justifikasi bagi kaum islamis untuk tidak memberikan toleransi kepada non-muslim. Menurut mereka, sepanjang non-muslim tidak bersedia membayar *jizyah* (upeti) dan tidak menyatakan loyalitasnya kepada Islam, maka mereka tak berhak mendapat hak-hak sipil

(*civil liberties*) dan kebebasannya. Lebih daripada itu, loyalitas kepada sesama muslim juga menjadi titik tolak perjuangan membentuk global Ummah, di mana aliansi *pax-Islamica* tidak didasarkan konsep teritorial dan negara-bangsa tapi kesamaan agama dan cara pandang.

Pendek kata, ide dasar kaum ekstremis, baik yang menggunakan kekerasan maupun tidak, adalah bahwa suatu pandangan dalam agama tertentu yang dipegang kokoh secara literal (*harfiah*), tanpa kompromi, penolakan, atau reinterpretasi atau pengurangan (Gellner, 1992: 2). Azyumardi Azra (1993: 19), misalnya, dengan memodifikasi kerangka Martin E. Marty, mengidentifikasi persamaan ekstremisme Islam dan Kristen, yang mencakup: *pertama*, menekankan interpretasi literal

“**Kriteria ekstremisme Islam: pertama, penolakan terhadap demokrasi, baik sebagai nilai maupun praktik; kedua, membolehkan penggunaan metode kekerasan dalam mencapai tujuan; ketiga, membenarkan tindakan terorisme; keempat, tidak mengakui hak-hak minoritas; dan kelima, tidak mengakui hak-hak perempuan.**”

Joshua Muravchik dan
Charlie Szrom (2008: 168)

terhadap kitab suci, dan karenanya menolak hermeneutika dan sikap kritis terhadap kitab suci; *kedua*, menolak perkembangan historis dan sosiologis; *ketiga*, agama harus disucikan dari isme-isme modern yang dianggap mengotori ajaran suci mereka;³ *keempat*, mengklaim paling benar dan menuding yang lain sesat, dan karenanya mereka menolak pluralisme dan relativisme. Joshua Muravchik dan Charlie Szrom (2008: 168) menambahkan beberapa kriteria penting tentang ekstremisme Islam, di antaranya: *pertama*, penolakan terhadap demokrasi, baik sebagai nilai maupun praktik; *kedua*, membolehkan penggunaan metode kekerasan dalam mencapai tujuan; *ketiga*, membenarkan tindakan terorisme; *keempat*, tidak mengakui hak-hak minoritas; dan *kelima*, tidak mengakui hak-hak perempuan.

Demikianlah pandangan-pandangan dasar kaum ekstremis yang membedakan dengan kelompok lainnya. Kaum ekstremis yang tidak menggunakan kekerasan pada dasarnya memiliki ideologi dan pandangan yang kurang lebih sama dengan ekstremisme yang memakai kekerasan (*violent extremism*). Yang membedakan mereka adalah mereka belum menggunakan kekerasan (*not-now-violent extremism*) karena belum mendapat kesempatan dan sumber daya yang cukup guna melakukan kekerasan.

Daftar Pustaka

- Al-Banna, H. (2007). *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I*. Solo: Era Intermedia.
- Awwas, I.S. (2003). *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*. Yogyakarta: Wihdah Press.
- Azra, A. (1991). Jihad dan Terorisme: Konsep dan Perkembangan Historis. *Islamika* No. 4 April-Juni.
- _____. (1993). Fenomena Fundamentalisme dalam Islam: Survei Historis dan Doktrinal. *Ulumul Qur'an*. No 3, Vol. IV.
- Coleman, P.T. dan Bartoli, A. (2018). *Addressing Extremism*. White Paper. New York: The International Center for Cooperation and Conflict Resolution, Columbia University. http://www.tc.columbia.edu/i/a/document/9386_WhitePaper_2_Extremism_030809.pdf

³ Martin E. Marty (1992: 3-13) menyebut dengan istilah "oppositionalism" (perlawanan) terhadap apa pun yang dianggap membahayakan agama, entah itu modernisme, liberalisme, atau sekulerisme.

- Gellner, E. (1992). *Postmodernism, Reason and Religion*. London and New York: Routledge.
- Jansen, J.J. (1997). *The Dual Nature of Islamic Fundamentalism*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Marty, M.E. (1992). What is Fundamentalisms? Theological Perspective. Dalam: H. Kung dan J. Moltmann. *Fundamentalism as Ecumenical Challenge*. London: SCM Press.
- Muhtadi, B. (2008). Thinking Globally, Acting Locally: A Social Movement Theory Approach of The Prosperous Justice Party (PKS) and Its Islamist Transnational Framing. Master thesis, The Australian National University.
- _____ (2009) The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, Volume 37, Issue 4, pp. 623 – 645.
- Mubarok, M.Z. dan Hamid A.F. (2018) The Rise of Radicalism and Terrorism in Indonesia and Malaysia. Unpublished manuscript.
- Muravchik, J. and Szrom, C. (2008) In Search of Moderate Muslims. Dalam: A. Hiber (ed). *Islamic Militancy*. Detroit: Greenhaven Press.
- Pinardi. (1964). *Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo*. Jakarta: Aryaguna.
- Pipes, D. (2000). Islam and Islamism: Faith and Ideology. *The National Interest*, Washington.
- Qutb, S. (2006). *Ma'alim fi al-Tariq*. A. B. al-Mehri (Ed). Maktabah Booksellers and Publishers.
- Roy, O. (2012). Islam: The Democracy Dilemma. Dalam: R. Wright (ed) *The Islamists Are Coming: Who They Really Are?* Washington DC: U.S. Institute of Peace and the Woodrow Wilson International Center for Scholars): 13-19.
- Schmid, A.P. (2014). *Violent and Non-Violent Extremism: Two Sides of the Same Coin*. ICCT Research Paper. The Hague: International Centre for Counter-Terrorism.
- Taimiyyah. I. (1992). *Al-Syiasah al-Syar'iyah fi Islah al-Rai' wa al-Rai'yyah*. Lubnan, Beirut: Dar Fikr.
- Watt, M. (1968). *Islamic Political Thought: The Basic Concepts*. Edinburgh: Edinburg University Press.
- Wibtrobe, R. (2006). *Extremism: The Political Economy of Radicalism*. Cambridge: University Press.

Pengukuran dalam Penelitian *Violent Extremism*: Kendala dan Solusi



Oleh :

Whinda Yustisia

A. MENYUSUN PERTANYAAN

[A.1] Prinsip Dasar

Dalam merancang pertanyaan untuk survei, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memahami konsep yang hendak diukur. Bagian awal buku ini telah menjelaskan konsep-konsep relevan dalam topik *violent extremism*. Konsep yang dimaksud kemudian diturunkan ke dalam sebuah *construct*¹. Biasanya, ada beberapa pilihan *construct* yang relevan dan bisa digunakan untuk memahami konsep utama. Peneliti dapat menentukan *construct* apa saja yang hendak diukur sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian.



Sebagai contoh, konsep yang ingin dipahami adalah ekstremisme. Ada beberapa alternatif *construct* yang dapat digunakan, seperti: (1) ekstremisme dengan kekerasan, (2) ekstremisme tanpa kekerasan, (3) radikalisme, dan (4) militan ekstremisme. Pemilihan *construct* tergantung pada kebutuhan atau pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Kemudian dari *construct* tersebut dapat diidentifikasi menjadi indikator-indikator yang bisa digunakan atau diturunkan ke dalam bentuk pertanyaan². Perhatikan ilustrasi berikut.

¹ *Construct* adalah tingkat abstraksi yang tertinggi (higher level abstraction) yang berguna untuk menginterpretasi data dan mengembangkan teori. *Psychological Construct: A Pattern of Behavior is Performed Consistently Over Time and in Different Contexts by Many Individuals* (Cronbach, 1971).

² Harkness, J. A., Braun, M., Edwards, B., Johnson, T. P., Lyberg, L. E., Mohler, P. P., dan Smith, T. W. (Eds.). (2010). *Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts* (Vol. 552). John Wiley & Sons.

Ilustrasi

Konsep: Ekstremisme

Construct: Dukungan terhadap ekstremisme dengan kekerasan

Indikator:

- (1) dukungan terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis;
- (2) dukungan terhadap pembubaran organisasi ekstremis yang menggunakan kekerasan;
- (3) menyebarkan informasi/berita yang mendukung organisasi ekstremis dengan kekerasan secara online.

Pertanyaan:

- (1) seberapa setujuakah Anda terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh organisasi X;
- (2) seberapa setujuakah Anda terhadap keberpihakan pemerintah membubarkan organisasi X;
- (3) apakah Anda pernah menyebarkan informasi/berita yang mendukung kegiatan organisasi X.

Penting: untuk digaribawahi bahwa dalam menyusun indikator dan pertanyaan, kata organisasi ekstremis perlu dihindari dan langsung merujuk pada organisasi yang dimaksudkan memiliki pandangan ekstrem.

Dalam pemilihan *construct* dan indikator, penting juga untuk menentukan tipe informasi yang diharapkan dari responden atau informan³. yaitu:

- (1) apakah ingin mengetahui fakta;
- (2) apakah ingin mengetahui perilaku;
- (3) apakah ingin mengetahui kondisi psikologis;
- (4) apakah ingin mengetahui sikap (dukungan);
- (5) apakah ingin mengetahui pengetahuan atau kompetensi.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang sebuah *construct*, semua tipe informasi tersebut sebaiknya ditanyakan. Namun, hal ini tentunya kembali lagi pada pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Hal yang perlu diperhatikan adalah setelah penentuan *construct* dan tipe informasi yang dibutuhkan, peneliti perlu memastikan indikator yang dipilih sejalan dengan apa yang hendak diukur.

³ Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2011). *The Impact of "Forgiving" Introductions on the Reporting of Sensitive Behavior in Surveys: The Role of Social Desirability Response Style and Developmental Status*. *Public Opinion Quarterly*, 75(4), 779–787. doi:10.1093/poq/nfr041.

[A.2] *Menyusun Pertanyaan dengan Topik Sensitif*

Menyusun pertanyaan untuk menggali topik sensitif memiliki banyak tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana caranya pertanyaan yang kita berikan kepada responden dapat dijawab dengan akurat. Akurat di sini maksudnya adalah apakah respons sudah sesuai menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dari responden. Ketidakkuratan dapat ditemukan pada responden yang tidak menjawab pertanyaan. Hal itu bisa disebabkan karena dua hal, yaitu (1) responden memang tidak ingin menjawab sama sekali karena alasan tertentu, seperti takut dinilai sebagai ekstremis, (2) responden sebenarnya bersedia menjawab, tetapi tidak bersedia identitasnya diketahui. Untuk dapat mengatasi kendala-kendala tersebut, ada empat solusi yang dapat dilakukan.

1. Menyiapkan pengantar penelitian yang baik

Penelitian untuk menggali topik-topik sensitif seperti *violent extremism* rentan terhadap penolakan. Karena itu, sejak awal penelitian, peneliti perlu menyiapkan pengantar yang dapat memberikan rasa nyaman dan menumbuhkan rasa percaya dari responden untuk mengungkapkan informasi yang sesungguhnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan adalah:

- Sampaikan kepada responden di bagian pendahuluan penelitian (lembar *disclaimer* atau *inform consent*) bahwa respons mereka dicatat secara anonim dan diolah secara rata-rata sehingga tidak ada yang bisa mengetahui respons jawaban responden karena sudah berbaur dengan data dari responden lainnya.
- Jelaskan bahwa tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk pemetaan pola jawaban secara umum pada keseluruhan responden penelitian, bukan analisis secara individual. Jika penelitian yang dimaksud merupakan penelitian untuk kepentingan akademik, maka akan lebih menguntungkan karena responden dapat lebih yakin bahwa data yang mereka berikan memang digunakan untuk kepentingan akademik semata dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu yang mungkin punya kepentingan untuk menjatuhkan pandangan atau kelompok ekstremis yang mereka dukung.
- Samarkan identitas responden, seperti nama, nomor telepon, atau alamat *email* untuk mengatasi responden yang sebenarnya ingin menjawab atau berpartisipasi pada penelitian.

2. Menggunakan pertanyaan dengan kalimat yang moderat ⁴

Pertanyaan dalam penelitian perlu dibuat moderat dan tidak menyerang atau menyinggung responden. Berikut adalah contoh dari pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan dengan kalimat moderat.

(1) Dengan menggunakan skala *thermometer* atau *continuous*, peneliti dapat menanyakan:

“Seberapa meresahkan menurut Anda organisasi berbasis agama seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bagi NKRI? Menurut Anda, dari skala 1 “sangat tidak meresahkan” sampai dengan 5 “sangat meresahkan”, di manakah posisi Anda?”

(2) Dengan pendekatan *semua orang melakukan itu*.

“Semua orang beragama punya keinginan untuk membela agamanya. Apakah Anda setuju dengan aksi-aksi jihad kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan tujuan untuk menjaga nilai-nilai agama Islam agar tidak rusak oleh nilai-nilai sekuler?”

(3) Dengan pendekatan *pendapat pakar*

“Para ulama percaya bahwa perlu ada upaya khusus untuk mengatasi penderitaan yang dialami umat Islam. Apakah Anda setuju dengan aksi-aksi jihad dengan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu sebagai tujuan untuk membela kepentingan umat Islam?”

(4) dengan pendekatan *memaafkan*⁵

“Sebagian orang berpendapat bahwa agama tidak perlu dibela karena agama tidak akan rusak karena penghinaan orang lain. Sebagian orang lainnya berpendapat bahwa setiap umat beragama memiliki kewajiban membela agamanya ketika ada dengan cara apa pun, termasuk dengan kekerasan. Seberapa setujukah Anda dengan aksi kekerasan yang dilakukan untuk membela agama karena dihina oleh orang dengan agama lain?”

⁴ Moderat: selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem; berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah (KBBI dalam jaringan, 2018).

⁵ Peter, J. & Valkenburg, P. M. (2011). *The Impact of “Forgiving” Introductions on the Reporting of Sensitive Behavior in Surveys: The Role of Social Desirability Response Style and Developmental Status*. *Public Opinion Quarterly*, 75(4), 779–787. doi:10.1093/poq/nfr041.

3. Depersonalisasi pertanyaan

Dalam kondisi tertentu, responden enggan menjawab pertanyaan sensitif karena khawatir jawaban yang mereka berikan akan dicatat bersama identitas pribadinya. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, pertanyaan dapat didepersonalisasi. Artinya, responden diminta untuk menilai pendapat orang-orang di sekitar mereka, alih-alih pendapat mereka secara personal. Misalnya, “Menurut Anda, seberapa setujuakah orang-orang di sekitar Anda terhadap aksi jihad dengan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam di Indonesia?”

4. Administrasi kuesioner: *self-administration* versus wawancara

Pertanyaan topik *violent extremism* juga menjadi sulit untuk ditanyakan apabila jawaban responden diadministrasikan atau diisi responsnya oleh pewawancara. Di satu sisi, pewawancara dapat memudahkan jalannya pengambilan data, terutama jika responden tidak terbiasa menjadi partisipan penelitian dengan mengisi kuesioner. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, kehadiran pewawancara dapat membuat responden enggan untuk mengungkapkan respons yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sebaiknya pengisian kuesioner penelitian dilakukan oleh responden sendiri. Namun, jika tidak mungkin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

(1) siapakah yang mewawancarai atau mendampingi responden ketika mengisi kuesioner (*ingroup* atau *outgroup*). Dalam penelitian psikologi menunjukkan bahwa identitas sosial merupakan salah satu faktor penting yang bisa memengaruhi cara pandang dan cara interaksi kita terhadap orang lain⁶.

- Jika responden mengetahui pewawancara adalah bagian dari kelompok sendiri (*ingroup*), maka responden akan bersikap lebih positif terhadap pewawancara dan pada gilirannya akan lebih terbuka mengungkapkan pandangannya.
- Akan tetapi, jika responden menganggap pewawancara sebagai bagian dari kelompok lain (*outgroup*), responden akan cenderung membatasi informasi-informasi personal yang dianggap akan memengaruhi penilaian pewawancara terhadap diri responden.

⁶ Tajfel, H. (1974). *Social Identity and Intergroup Behaviour*. *Information (International Social Science Council)*, 13(2), 65-93.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pewawancara perlu memperkenalkan diri senetral mungkin. Upayakan identitas sosial pewawancara sejalan dengan identitas responden. Namun, jika tidak memungkinkan, pewawancara perlu memperhatikan informasi personal mana saja yang perlu disampaikan pada saat wawancara.

(2) apakah pewawancara yang bertugas untuk mengambil data merasa tidak nyaman menanyakan pertanyaan dalam survei penelitian⁷. Jika merasa tidak nyaman, lebih baik pewawancara melewatkan pertanyaan tersebut.

Cara lain yang dapat dilakukan oleh pewawancara adalah meminta responden untuk mengisi sendiri bagian pertanyaan yang dinilai sensitif dan langsung menyimpannya ke sebuah amplop.

B. FORMAT RESPONS JAWABAN

Menyusun respons jawaban yang tepat sama pentingnya dengan menyusun pertanyaan dalam kuesioner. Penelitian-penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa perbedaan format respons (*open-closed ended*) pada kuesioner menyebabkan perbedaan respons jawaban⁸. Secara umum, ada lima format respons jawaban, yaitu:

1. Terbuka
2. Tertutup dengan beberapa pilihan jawaban, respons jawaban hanya satu
3. Tertutup dengan beberapa pilihan jawaban, responden bisa memilih jawaban lebih dari satu
4. Skala kategori (sangat tidak mendukung, tidak mendukung, mendukung, sangat mendukung)
5. Skala *continuous/thermometer* (skala 1-10, 1 sangat tidak mendukung, 10 sangat mendukung)

Kelima format respons jawaban tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, pemilihan format respons jawaban lebih didasarkan pada informasi apa yang hendak diperoleh dari pertanyaan tersebut. Berikut ringkasan kelebihan dan kekurangan dari setiap format respons jawaban dan saran penggunaan.

⁷ Krumpal, I. (2013). *Determinants of Social Desirability Bias in Sensitive Surveys: A Literature Review*. *Quality & Quantity*, 47(4), 2025-2047.

⁸ Untuk selengkapnya dapat dilihat di <http://www.pewresearch.org/methodology/u-s-survei-research/questionnaire-design/#>.

Format Respons Jawaban	Kelebihan	Kekurangan	Saran Penggunaan
Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan respons jawaban yang orisinal dari responden. • Mendapatkan gambaran respons yang lebih deskriptif karena jawaban responden tidak dibatasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responden tidak mampu menyampaikan jawaban walaupun sebenarnya bisa menjawab jika diberi panduan. • Respons jawaban bisa jadi tidak relevan. • Perlu keterampilan pewawancara untuk memastikan responden jawaban sesuai dengan pertanyaan. 	Baik digunakan untuk menanyakan opini, belief, atau penilaian (judgment) tentang topik-topik spesifik, seperti: “Menurut Anda, apa arti menjadi muslim yang baik?”, “Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan jihad?”
Tertutup dengan beberapa pilihan jawaban, responden diminta memilih salah satu	<ul style="list-style-type: none"> • Memudahkan analisis. • Menstandarisasi respons jawaban. • Mendorong responden untuk mempertimbangkan satu jawaban yang paling sesuai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membatasi respons jawaban . • Sulit membacakan semua jawaban yang kemudian harus dipilih salah satu. Kemungkinan ada efek urutan pilihan jawaban, yang diingat adalah pilihan jawaban paling awal atau paling akhir (<i>primary/recency effect</i>) terutama ketika pilihan jawaban banyak. 	Baik digunakan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan berisi informasi faktual, seperti: “Apakah Anda tergabung dalam organisasi berbasis keagamaan tertentu?”
Tertutup dengan beberapa pilihan jawaban, responden bisa memilih jawaban lebih dari satu	<ul style="list-style-type: none"> • Memudahkan analisis. • Menstandarisasi respons jawaban.. • Mendapatkan informasi yang lebih banyak daripada format respons “pilih satu”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responden mungkin memilih secara acak pilihan jawaban yang diberikan tanpa pertimbangan yang mendalam. • Pilihan jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi responden, tapi kemudian responden terpaksa memilih format respons yang ada. 	Baik digunakan untuk menanyakan pertanyaan menggali informasi faktual, dan dimungkinkan respons jawaban lebih dari satu. Contoh: “Dari berbagai kegiatan organisasi berikut, organisasi mana yang menurut Anda paling merepresentasikan nilai Islam?”

<p>Skala Kategori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memudahkan analisis. • Menstandarisasi respons jawaban. • Membantu responden untuk mengenali derajat dukungan yang ia berikan terhadap sebuah objek/isu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responden yang tidak terbiasa sering kali merasa bingung dengan pilihan jawaban yang diberikan. • Memakan waktu cukup lama untuk membaca secara berulang label setiap jawaban (responden sering kali lupa label yang diberikan). • Responden dengan Pendidikan rendah cenderung menjawab setuju (<i>acquiescence bias</i>). • Kecenderungan responden untuk menjawab di tengah untuk mengambil posisi aman (jika pilihan jawaban ganjil, 1-3; 1-5; 1-7). 	<p>Dapat digunakan untuk menanyakan derajat dukungan/sikap. Misal: "Seberapa setujuakah Anda Aksi Bela Tauhid?" 1=Sangat Tidak Setuju, 2=Tidak Setuju, 3=Setuju, 4=Sangat Setuju</p>
<p>Skala Continuous/ Thermometer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memudahkan analisis. • Menstandarisasi respons jawaban. • Membantu responden untuk mengenali derajat dukungan yang diberikan terhadap sebuah objek/isu. • Respons jawaban bisa jadi lebih halus/sensitif menggambarkan apa yang sebenarnya dirasakan atau dipikirkan oleh responden 	<p>Tidak ada standardisasi penilaian. Makna nilai 6 bagi satu orang bisa jadi cukup tinggi, tapi bagi orang lain rendah.</p>	<p>Baik untuk menanyakan pertanyaan yang sangat subjektif. Jika menggunakan skala kategori akan sulit. Misal "Seberapa Anda merasa cemas terhadap tumbuhnya ajaran-ajaran agama yang menyimpang dari yang seharusnya? Berikan respons jawaban Anda dari skala 0 sangat tidak cemas sampai dengan 10 sangat cemas"</p>

C. MENGGUNAKAN RANDOMISASI

Randomisasi merupakan teknik pengambilan data yang biasa digunakan untuk survei dengan topik atau pertanyaan sensitif. Teknik ini berupaya untuk mengatasi beberapa permasalahan, salah satunya adalah responden tidak mau menjawab pertanyaan karena tidak benar-benar percaya bahwa informasi yang mereka berikan bersifat anonim sehingga memilih untuk tidak menjawab. Dengan randomisasi, responden bisa menjawab pertanyaan dengan “aman” karena tidak akan ada yang tahu jawaban responden sesungguhnya, bahkan pengambil data sekalipun. Namun, perlu diketahui bahwa hasil analisis data dengan teknik ini digunakan untuk mengambil kesimpulan secara umum pada sebuah populasi, bukan hasil individual. Ada tiga jenis teknis randomisasi yang bisa digunakan⁹, yaitu:

1. *Forced choice*

Teknik *forced choice* merupakan pilihan teknik randomisasi paling mudah. Teknik ini dapat dilakukan dengan pewawancara memberikan instruksi kepada responden:

“Silakan lempar koin ini dan lihat apakah angka atau garuda yang muncul. Jangan beritahukan kepada saya hasil apa yang muncul. Jika yang muncul adalah angka, maka silakan menjawab “YA” terhadap pertanyaan saya. Jika yang muncul adalah garuda, maka silakan menjawab pertanyaan saya dengan jujur.”

Setelah responden paham dengan instruksi, pewawancara dapat melanjutkan membaca pertanyaan, misalnya “Apakah Anda ikut dalam Aksi Bela Islam?” Karena kemungkinan munculnya jawaban “YA” (kemungkinan munculnya angka) adalah 50%, maka selisih antara total jawaban “YA” yang didapatkan dengan total jawaban “YA” yang seharusnya merupakan persentase responden yang ikut Aksi Bela Islam. Misalnya total ada 57% responden menjawab “YA” untuk pertanyaan ini, maka total sesungguhnya yang ikut Aksi Bela Islam adalah 7%.

2. *Endorsement Experiment*

Endorsement experiment merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui sikap terhadap seorang figur atau kelompok yang sensitif untuk

⁹ Untuk selengkapnya dapat dilihat di <http://www.pewresearch.org/methodology/u-s-survei-research/questionnaire-design/#>.

dibahas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengombinasikan pertanyaan antara (1) sikap terhadap figur atau kelompok dan (2) sikap terhadap sebuah kebijakan. Sama halnya dengan teknik *forced choice*, responden dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok kontrol hanya akan mendapatkan pertanyaan sikap tentang sebuah kebijakan. Sementara kelompok eksperimen mendapatkan pertanyaan tentang sikap terhadap kebijakan yang persis sama dengan kelompok kontrol sekaligus sikap terhadap figur atau organisasi yang menjadi target utama. Perbedaan antara sikap terhadap kebijakan saja dan sikap terhadap kebijakan beserta figur/organisasi adalah skor penilaian terhadap figur/organisasi.

Sebagai ilustrasi, dalam sebuah survei yang hendak mengukur dukungan terhadap organisasi-organisasi militan di Pakistan, peneliti menggunakan pertanyaan berikut di kelompok kontrol:

The World Health Organization recently announced a plan to introduce universal polio vaccination across Pakistan. How much do you support such a plan?

(1) A great deal; (2) A lot; (3) A moderate amount; (4) A little; (5) Not at all.

Sementara itu, untuk kelompok eksperimen, peneliti menggunakan pertanyaan berikut:

The World Health Organization recently announced a plan to introduce universal polio vaccination across Pakistan. Pakistani militant groups fighting in Kashmir have voiced support for this program. How much do you support such a plan?

(1) A great deal; (2) A lot; (3) A moderate amount; (4) A little; (5) Not at all.

Dari contoh di atas dapat terlihat bahwa peneliti tidak berfokus pada sikap terhadap kebijakan vaksin polio di Pakistan, tapi sikap terhadap kelompok/organisasi yang mendukung kebijakan tersebut. Jika responden menunjukkan sikap yang negatif terhadap kebijakan, tetapi mendukung kelompok/organisasi yang mendukung kebijakan, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa responden cenderung menjawab setuju terhadap pertanyaan tersebut.

Dalam penggunaan teknik ini perlu diperhatikan bahwa kebijakan yang dipilih bukanlah kebijakan yang menimbulkan sikap dukungan yang terlalu positif atau terlalu negatif. Jika demikian, sikap terhadap figur atau kelompok yang menjadi fokus utama menjadi tidak dapat teridentifikasi dengan baik, responden akan cenderung menjawab setuju atau tidak setuju tergantung dari sikap awal terhadap kebijakan, terlepas dari kelompok apa yang mendukung kebijakan tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting untuk uji coba kebijakan yang ingin digunakan dalam pertanyaan sebelum survei dijalankan.

3. *List Experiment*

Teknik ini menanyakan jawaban responden terhadap pertanyaan sensitif dengan memberikan respons jawaban “YA” atau “TIDAK” terhadap list (daftar) yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sensitif dan tidak sensitif. Dengan cara ini, jawaban responden terhadap pertanyaan sensitif bisa disembunyikan dengan jawaban pertanyaan lainnya. Penerapan teknik ini bisa dilihat pada sebuah survei dukungan terhadap kelompok militan di Afghanistan¹⁰. Dalam survei tersebut, peneliti memberikan instruksi:

“Saya akan membacakan daftar nama-nama kelompok dan individu. Setelah saya membacakan daftar tersebut, Anda diminta untuk memberitahu saya berapa banyak kelompok atau individu yang Anda dukung secara umum. Artinya adalah Anda secara umum setuju dengan tujuan dan kebijakan kelompok atau individu tersebut. Anda tidak perlu memberi tahu saya secara spesifik kelompok atau individu mana yang Anda dukung”

Pilihan jawaban kelompok kontrol: (1) Pemerintah Karzai; (2) Program National Solidarity; (3) petani lokal.

Pilihan jawaban kelompok eksperimen: (1) Pemerintah Karzai; (2) kelompok asing; (3) Program National Solidarity; (4) petani lokal.

¹⁰ Blair, G., Imai, K., dan Lyall, J. (2014). Comparing and Combining List and Endorsement Experiments: Evidence from Afghanistan. *American Journal of Political Science*, 58(4), 1043-1063. doi:10.1111/ajps.12086.

Teknik *list experiment* telah diketahui dapat meningkatkan respons jawaban¹¹. Namun, teknik ini memiliki kekurangan, yaitu tidak sepenuhnya melindungi respons jawaban responden. Misalnya, responden di kelompok eksperimen yang menjawab YA untuk seluruh pilihan jawaban yang ada di daftar dapat diidentifikasi sebagai pendukung kekuatan asing. Demikian juga yang menjawab TIDAK, dapat diidentifikasi sebagai bukan pendukung kekuatan asing. Oleh karena itu, tetap ada kemungkinan bahwa responden tidak memberikan jawaban yang sebenarnya agar terhindar dari penilaian tertentu.

D. UJI COBA ALAT UKUR

Setelah pertanyaan dan format respons jawaban berhasil dirancang, tahapan terakhir yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah uji coba. Secara umum tahapan uji coba diperlukan untuk memastikan:

1. Kejelasan kuesioner (*questionnaire clarity*). Maksudnya, apakah responden dapat menjawab semua pertanyaan yang ada di kuesioner. Jika ada beberapa pertanyaan yang dinilai ambigu, maka apa yang diinterpretasikan oleh responden berbeda dengan apa yang dipahami oleh peneliti. Selain itu, perlu diperhatikan juga apakah format respons jawaban yang dipilih atau diberikan kepada responden sudah tepat atau belum. Jika format respons jawaban adalah tertutup, apakah pilihan jawaban yang dimasukkan sudah cukup untuk mendapatkan informasi yang diharapkan atau belum.
2. Kelengkapan kuesioner (*questionnaire comprehensiveness*). Maksudnya, apakah di setiap pertanyaan dengan pilihan respons jawaban sudah dinilai mencakup semua alternatif jawaban. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa jika terdapat pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, tidak lengkap, atau berulang, maka pertanyaan tersebut tidak perlu dicantumkan.
3. Penerimaan kuesioner (*questionnaire acceptability*). Maksudnya, apakah semua pertanyaan yang diberikan di kuesioner dapat diterima oleh responden dan dinilai tidak mengganggu privasi, menyerang personal responden, tidak etis, atau menimbulkan emosi-emosi tidak menyenangkan, seperti tersinggung, marah, kecewa, dan lain sebagainya.

¹¹ Blair, G. (2015). Survey Methods for Sensitive Topics. *Comparative Politics Newsletter*, 12.

Daftar Pustaka

- Harkness, J. A., Braun, M., Edwards, B., Johnson, T. P., Lyberg, L. E., Mohler, P. P., ... & Smith, T. W. (Eds.). (2010). *Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts* (Vol. 552). John Wiley & Sons.
- Peter, J., dan Valkenburg, P. M. (2011). *The Impact of "Forgiving" Introductions on the Reporting of Sensitive Behavior in Surveys: The Role of Social Desirability Response Style and Developmental Status*. *Public Opinion Quarterly*, 75(4), 779-787. doi:10.1093/poq/nfr041.
- Tajfel, H. (1974). Social Identity and Intergroup Behaviour. *Information (International Social Science Council)*, 13(2), 65-93.
- Krumpal, I. (2013). *Determinants of Social Desirability Bias in Sensitive Surveys: A Literature Review*. *Quality & Quantity*, 47(4), 2025-2047.
- Groves, R. M., Fowler Jr, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., dan Tourangeau, R. (2011). *Survey Methodology* (Vol. 561). John Wiley & Sons.
- Chou, W., Imai, K., & Rosenfeld, B. (2017). *Sensitive Survey Questions with Auxiliary Information*. *Sociological Methods & Research*, 0049124117729711.
- Fair, C. C., N. Malhotra, dan J. N. Shapiro. (2009). *The Roots of Militancy: Explaining Support for Political Violence in Pakistan*. Working Paper. Princeton University.
- Blair, G., Imai, K., & Lyall, J. (2014). Comparing and Combining List and Endorsement Experiments: Evidence from Afghanistan. *American Journal of Political Science*, 58(4), 1043-1063. doi:10.1111/ajps.12086.
- Blair, G. (2015). Survey Methods for Sensitive Topics. *Comparative Politics Newsletter*, 12.

Dok. Istimewa



Seorang peugas seurvei melakukan wawancara terhadap responden

Sampling, Pelaksanaan, Analisis dan Penulisan Laporan



Oleh :

Deni Irvani

Proses survei terdiri atas sejumlah tahapan yang saling berhubungan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi penentuan tujuan penelitian, populasi sasaran, mode survei, metode sampling, pembuatan instrumen, pengumpulan data, dan analisis.¹ Hasil sebuah survei bergantung pada seberapa baik seluruh tahapan tersebut dijalankan. Bila seluruh tahapan dilakukan dengan benar, survei cenderung memiliki tingkat eror (kesalahan) yang kecil sehingga hasilnya dapat diandalkan. Sebaliknya, survei yang tidak dilakukan melalui proses yang benar cenderung menghasilkan eror yang besar.²

Setiap penelitian survei pada dasarnya menghadapi masalah yang sama, yakni bagaimana cara meminimumkan eror. Meski demikian, survei dengan topik penelitian yang sensitif seperti *violent extremism* memiliki tantangan yang relatif lebih besar. Masalah-masalah yang potensial terjadi dalam pelaksanaan survei *violent extremism* di antaranya adalah warga yang seharusnya terpilih sebagai responden tidak bisa diakses, tidak bersedia berpartisipasi dalam survei, tidak mau menjawab sejumlah pertanyaan yang sensitif, atau tidak jujur dalam menjawab pertanyaan survei. Ini semua merupakan sumber-sumber *nonsampling error* yang harus diantisipasi lewat perencanaan survei yang matang.

Secara garis besar, eror dalam survei terbagi menjadi dua jenis: (1) *sampling error*, yakni eror yang terjadi karena survei hanya mengamati sebagian

¹ Tahapan dalam proses survei bisa dalam urutan yang berbeda, misalnya pembuatan instrumen dapat dilakukan sebelum menentukan metode sampling.

² Dalam konteks survei, eror adalah perbedaan antara hasil atau nilai yang diperoleh dan nilai yang sebenarnya.

populasi (survei dengan sampling, bukan sensus), dan (2) *nonsampling error*, yakni eror yang terjadi karena masalah lain di luar persoalan sampling. Dua jenis eror ini memerlukan penanganan yang berbeda. *Sampling error* dapat diminimumkan dengan memilih metode sampling yang baik dan menentukan ukuran sampel yang besar, sedangkan *nonsampling error* lebih sulit diatasi.³

SAMPLING

Survei bisa saja dilakukan dengan sensus, yakni mengumpulkan data dari seluruh anggota populasi. Meski demikian, sensus sangat jarang dapat dilakukan karena membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama (tidak efisien). Cara survei yang lebih efisien adalah melalui sampling, yakni mengumpulkan data dari sampel (sebagian anggota populasi).

Ada berbagai jenis metode sampling yang bisa digunakan dalam melakukan survei, tapi tidak semua metode sampling dapat menghasilkan sampel yang baik. Sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili populasi (representatif), dan untuk itu terdapat sejumlah hal yang harus dilakukan.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan populasi sasaran. Populasi sasaran dalam survei harus didefinisikan dengan jelas, misalnya warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih, warga berumur 17-30 tahun di kota A, dan lain sebagainya, sesuai dengan tujuan penelitian.

Setelah populasi sasaran ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan *sampling frame*, yakni daftar seluruh unit populasi untuk dipilih dengan metode sampling. Unit-unit ini harus mencakup seluruh populasi sasaran, tidak *overlap* (unik), dan memuat informasi yang memadai tentang bagaimana cara mengaksesnya (lokasi, alamat jelas, atau nomor telepon).

Penentuan *sampling frame* sangat berkaitan dengan mode survei yang dipilih: wawancara tatap muka, wawancara lewat telepon, survei lewat surat, atau lainnya. Setiap mode survei membawa konsekuensi terhadap sampel yang dikumpulkan. Survei lewat telepon, misalnya, umumnya menghasilkan sampel dengan *response rate* yang rendah dan tidak cocok untuk survei dengan jumlah pertanyaan yang banyak karena responden bisa secara sepihak mengakhiri proses wawancara. Selain itu, hasil survei

³ Pembahasan rinci berbagai jenis nonsampling error dan penanganannya dalam survei dapat dibaca dalam karya Weisberg (2005).

telepon tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh populasi di luar pemilik telepon (hanya mewakili populasi pemilik telepon). Dari pengalaman di Indonesia sejauh ini, mode survei yang lebih cocok untuk penelitian yang komprehensif dan dengan populasi sasaran yang besar adalah wawancara tatap muka.

“**Metode sampling harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat meminimumkan eror dalam survei.**”

Setelah *sampling frame* dan mode survei ditentukan, selanjutnya kita tentukan metode samplingnya. Penggunaan metode *nonprobability sampling* harus dihindari karena hasil survei dengan metode sampling tersebut tidak bisa digeneralisasi mewakili populasi. Metode *probability sampling* adalah pilihan yang lebih baik.

Bila *sampling frame* terdiri atas unit-unit seluruh populasi sasaran langsung, maka kita dapat langsung memilih sampel dari populasi tersebut dengan metode sampling satu tahap. Namun, sering kali *sampling frame* tersebut tidak tersedia. Dalam melakukan survei terhadap warga di suatu wilayah, misalnya, data yang tersedia mungkin hanya daftar nama desa/kelurahan di wilayah tersebut. Jika demikian, maka *sampling frame* dapat dibuat secara bertahap, kemudian pemilihan sampel dilakukan secara bertingkat (*multistage*).

Metode sampling harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat meminimumkan eror dalam survei. Pertama ukuran sampel harus memadai. Semakin besar ukuran sampel dalam survei semakin kecil *sampling error*-nya. Survei dengan sampel besar harus diiringi dengan pengorganisasian lapangan yang baik karena survei besar memiliki potensi terjadinya *nonsampling error* yang besar pula. Survei dengan ukuran sampel 10.000 bila tidak diorganisasikan dengan baik tidak menjamin akan menghasilkan total eror yang lebih kecil dibanding survei dengan ukuran sampel 800.

Sampling error juga dapat ditekan dengan menerapkan stratifikasi dalam proses sampling, yakni membagi populasi menjadi beberapa subpopulasi. Misalnya dalam sampling terhadap populasi warga di suatu provinsi, populasi terlebih dahulu dibagi menurut kabupaten/kota, status wilayah

desa-kota, dan gender. Semakin banyak penggunaan variabel stratifikasi dalam sampling dapat menghasilkan sampel yang lebih baik, tapi hal tersebut membutuhkan ukuran sampel yang semakin besar. Dalam praktik, stratifikasi umumnya dilakukan berdasarkan 1-3 variabel.

Setelah itu penarikan sampel dilakukan di setiap subpopulasi (*stratum*). Bila *sampling frame* dibuat secara bertahap, maka sampel di setiap subpopulasi dipilih secara bertahap pula. Contoh, survei terhadap populasi warga di suatu provinsi bisa dilakukan dengan metode *stratified multistage random sampling* berikut:

Stratifikasi: populasi sasaran dikelompokkan menurut kab/kota dan pedesaan-perkotaan, dan ukuran sampel di setiap stratum dialokasikan secara proporsional sesuai total pemilih.⁴ Selanjutnya sampel dipilih secara bertingkat di setiap stratum:

- *Stage-1*: desa/kelurahan (sebagai *primary sampling unit*) di setiap stratum dipilih secara acak dengan jumlah proporsional.
- *Stage-2*: Di setiap desa/kelurahan terpilih populasi RT didaftarkan, kemudian dipilih secara acak sebanyak 5 RT (*secondary sampling unit*).
- *Stage-3*: Di setiap RT terpilih populasi keluarga didaftarkan, kemudian dipilih secara acak dengan dua keluarga (*tertiary sampling unit*).
- *Stage-4*: Di setiap keluarga terpilih, seluruh anggota keluarga yang punya hak pilih didaftarkan: pada keluarga pertama didaftarkan anggota keluarga laki-laki saja, dan pada keluarga kedua didaftarkan anggota keluarga perempuan saja (stratifikasi gender tersarang di dalam *secondary sampling unit*). Selanjutnya di setiap keluarga terpilih dipilih secara acak satu anggota keluarga sebagai responden (*ultimate sampling unit*).

Dalam contoh metode sampling di atas, terdapat tiga variabel strata (kab/kota, desa-kota, dan gender) dan tiga variabel *cluster* (desa/kelurahan, RT, dan keluarga).⁵ Secara teoretis, penggunaan *cluster* dalam sampling dapat menaikkan *sampling error*, sebaliknya penggunaan strata dapat menurunkan *sampling error*. Karena itu, penggunaan strata dalam *multistage random*

⁴ Sampel bisa saja tidak proporsional menurut strata jika peneliti ingin memperbesar ukuran sampel pada kelompok populasi tertentu untuk memperoleh informasi yang memadai dari kelompok tersebut (*oversampling*).

⁵ Istilah *cluster* dalam sampling merujuk pada kelompok unit populasi untuk dipilih dalam proses sampling, dan karena itu belum tentu terpilih. Bedakan dengan istilah strata yang merupakan subset populasi yang harus terwakili dalam sampel.

sampling diharapkan dapat mereduksi eror yang ditimbulkan karena penggunaan *cluster* (*cluster effect*).⁶

PENGUMPULAN DATA

Setelah metode *sampling* ditetapkan dan instrumen survei selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah merekrut, melatih, dan menugaskan enumerator. Enumerator merupakan ujung tombak dalam proses survei. Kualitas data survei ditentukan oleh proses pengumpulan data yang dilakukan oleh enumerator. Karena itu, kualifikasi dan karakteristik enumerator harus menjadi perhatian, terutama dalam menjalankan survei yang sensitif seperti penelitian *violent extremism* ini. Dengan kata lain, rekrutmen enumerator harus dilakukan secara hati-hati dan selektif.

Enumerator yang sudah direkrut harus dilatih dengan baik bagaimana cara mengumpulkan data yang sesuai dengan rancangan survei yang telah ditetapkan. Enumerator harus dipastikan memahami dengan baik setiap pertanyaan dan instruksi di dalam kuesioner, mengerti cara memilih responden, dan paham bagaimana cara mewawancarai responden.



Enumerator yang telah dilatih kemudian ditugaskan untuk melakukan pengumpulan data di lapangan. Ada baiknya penempatan enumerator memperhatikan kesesuaian antara karakteristik enumerator dan karakteristik responden yang akan diwawancarai. Responden biasanya lebih nyaman dan lebih terbuka dalam mengungkapkan pendapat dan perilakunya kepada 'orang dalam' (*ingroup*). Misalnya responden akan merasa lebih nyaman dan terbuka berbicara kepada orang yang berasal dari wilayah yang sama atau memiliki kesamaan dalam hal suku bangsa, agama, dan gender.

Tantangan besar dalam kegiatan lapangan survei *violent extremism* adalah mengakses responden. Wilayah tempat responden tinggal bisa jadi

⁶ Untuk mempelajari lebih jauh berbagai metode *sampling*, baca Cochran (1977), Kish (1965), dan Scheaffer et al (1996).

“Peneliti mungkin akan berhadapan dengan pilihan apakah akan tetap mengakses responden dengan risiko yang besar atau mengeluarkan sebagian populasi yang dinilai tidak *fisible* untuk disurvei. Yang pasti, faktor keamanan, baik dari sisi enumerator yang akan ditugaskan maupun dari sisi responden, harus sangat diperhatikan.”

merupakan wilayah yang berbahaya atau sulit untuk diakses oleh enumerator. Peneliti mungkin akan berhadapan dengan pilihan apakah akan tetap mengakses responden dengan risiko yang besar atau mengeluarkan sebagian populasi yang dinilai tidak *fisible* untuk disurvei. Yang pasti, faktor keamanan, baik dari sisi enumerator yang akan ditugaskan maupun dari sisi responden, harus sangat diperhatikan. Kegiatan lapangan sebaiknya tidak dilakukan dalam masa konflik atau ketika tindak kekerasan sedang terjadi. Dan untuk

menghindari kesalahpahaman yang bisa muncul di lapangan, enumerator harus dibekali dengan surat izin penelitian dari pemerintahan wilayah setempat.

Setelah kegiatan lapangan selesai dilakukan, data hasil wawancara dengan responden harus dimasukkan ke komputer sehingga menjadi dataset yang siap untuk diolah dan dianalisis.

ANALISIS DATA

Sebelum melakukan analisis data, peneliti harus cermat melihat apakah sampel yang diperoleh telah memenuhi syarat untuk digeneralisasi ke populasi sehingga proses analisis data bisa langsung dilakukan. Atau secara lebih teknis: apakah data yang tersedia perlu dibobot terlebih dahulu atau tidak.⁷ Bagaimana cara mengetahui apakah data perlu dibobot dan tidak?

Dasar dari perlu tidaknya pembobotan data adalah, *pertama*, dengan melihat bagaimana cara peneliti memberi peluang pada setiap unit populasi untuk

⁷ Pembobotan adalah memberi bilangan-bilangan pembobot untuk setiap observasi sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan representasi sampel terhadap populasi.

dapat terpilih sebagai sampel. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana: bagaimana metode samplingnya? Bila metode sampling yang digunakan memperlakukan setiap unit populasi sehingga memiliki peluang terpilih yang sama, misalnya dalam metode *simple random sampling*, maka pembobotan tidak dilakukan. Tapi jika unit-unit populasi memiliki peluang terpilih yang berbeda, misalnya ketika *oversampling* dilakukan pada kelompok populasi tertentu, maka pembobotan data menjadi wajib.

Yang *kedua*, perlu atau tidaknya pembobotan data didasarkan atas validasi sampel dengan cara membandingkan profil demografi sampel dengan demografi populasi hasil sensus (misalnya wilayah, desa-kota, gender, agama, etnisitas). Jika profil demografi sampel hasil survei berbeda signifikan dengan profil demografi populasi hasil sensus—dan hal ini bisa berdampak besar terhadap hasil analisis data secara keseluruhan—maka peneliti perlu melakukan pembobotan data tambahan sedemikian rupa sehingga karakteristik demografi sampel menjadi dekat dengan karakteristik populasi.⁸

Dalam rangka memvalidasi temuan, peneliti juga perlu membandingkan hasil survei dengan hasil-hasil survei ilmiah sebelumnya. Jika misalnya survei-survei ilmiah sebelumnya menyatakan bahwa dukungan terhadap suatu organisasi radikal antara 5-10%, sementara dalam temuan survei terbaru angkanya mencapai 40%, maka peneliti harus punya penjelasan yang kuat mengapa dalam selang waktu tertentu (jarak waktu antarsurvei) terjadi kenaikan yang sangat besar. Jika tidak, maka peneliti harus memeriksa apakah telah terjadi kesalahan yang sistematis dalam proses survei dan harus diperbaiki.

Selanjutnya, peneliti harus memperhatikan masalah *nonresponse*, yakni kegagalan survei dalam memperoleh jawaban responden, yang sangat potensial terjadi dalam survei dengan topik sensitif seperti *violent extremism*. *Nonresponse* dapat dibagi menjadi dua jenis: *pertama*, unit *nonresponse*, yakni individu yang seharusnya terpilih sebagai responden tidak berhasil diwawancarai. *Kedua*, item *nonresponse*, yakni responden berhasil diwawancarai, tapi tidak dapat atau tidak bersedia menjawab pertanyaan tertentu.

Proporsi unit *response rate* dalam sampel harus dilaporkan dan dimuat dalam penjelasan metodologi survei—bersama-sama dengan informasi populasi sasaran, metode sampling, total sampel, mode survei, dan estimasi *margin of error*. Hal ini sangat penting agar pembaca laporan mempunyai pemahaman

⁸ Dalam metode survei hal ini dikenal dengan istilah post-stratification.

yang cukup untuk menilai hasil survei.⁹ *Nonresponse* adalah salah satu sumber eror dalam survei, karena itu peneliti dan pembaca laporan harus berhati-hati dalam menggeneralisasi hasil bila survei memiliki *nonresponse* yang besar.

Sementara itu, item *nonresponse* dapat memengaruhi cara menganalisis dan menyajikan data. Sebagian peneliti merasa perlu menyajikan besarnya item *nonresponse* dalam laporan survei, misalnya dengan menampilkan berapa banyak proporsi responden yang menjawab “Tidak Tahu/Tidak Jawab”.¹⁰ Namun, sebagian peneliti yang lain mungkin memilih untuk mengabaikan jawaban “Tidak Tahu/Tidak Jawab”. Karena itu, laporan survei harus memuat informasi yang cukup bagaimana peneliti memperlakukan item *nonresponse*.

Dalam menganalisis data, peneliti dapat memulainya dengan membuat analisis sederhana, misalnya analisis yang menghasilkan informasi-informasi pokok seperti proporsi, mean, median, atau standard deviasi, dari setiap variabel tunggal (*univariate*). Dalam survei *violent extremism*, misalnya, analisis sederhana ini dapat menggambarkan berapa banyak proporsi warga yang pernah melakukan tindakan-tindakan ekstrem, seperti merusak rumah ibadah umat agama lain, menyumbang dana untuk organisasi teroris, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, peneliti biasanya merasa perlu mengetahui perbedaan jawaban untuk setiap pertanyaan menurut kelompok populasi. Misalnya peneliti ingin mengetahui warga yang tinggal di wilayah mana yang lebih banyak melakukan tindakan-tindakan ekstrem? Apakah tindakan radikal pada kelompok laki-laki relatif lebih banyak dibanding kelompok perempuan? Bagaimana dengan kelompok umur, pendidikan, dan lain-lain? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab misalnya lewat analisis tabulasi silang antarvariabel.

Jika peneliti ingin menggali lebih jauh hubungan antarvariabel, peneliti dapat melakukan analisis *multivariate*. Misalnya, peneliti mungkin ingin mengetahui faktor apa yang menjadi sumber utama dari tindakan kekerasan.

⁹ Penulisan istilah unit response rate biasanya disingkat response rate.

¹⁰ Misalnya dalam laporan penelitian survei oleh Saifulmujani Research & Consulting (2017): Dari 66,4% warga yang tahu ISIS, sekitar 2,7% setuju atau sangat setuju dengan cita-cita ISIS memperjuangkan khilafah. Selebihnya 89,6% menjawab tidak setuju atau sangat tidak setuju dan 7,8% tidak tahu/tidak menjawab. Juga dalam laporan penelitian survei oleh Lembaga Survei Indonesia (2018): sekitar 38% dari warga muslim keberatan bila nonmuslim mengadakan kegiatan keagamaan di daerah sekitarnya, selebihnya 54% menjawab tidak keberatan, dan 8% tidak tahu/tidak jawab/tergantung.

Dengan analisis *multivariate*, peneliti dapat mengetahui secara lebih jelas bagaimana suatu faktor secara bebas memengaruhi tindakan kekerasan (dikontrol oleh faktor-faktor lain).

Ketika melakukan analisis *multivariate*, peneliti biasanya berhadapan dengan masalah item *nonresponse*. Jika proporsi item *nonresponse* sedikit, peneliti dapat mengabaikannya karena

tidak banyak mengganggu hasil analisis. Namun, jika jumlahnya besar, maka peneliti perlu memberi perlakuan khusus, yakni dengan melakukan imputasi.¹¹ Terdapat berbagai metode imputasi, dan metode yang berbeda bisa membawa hasil yang berbeda. Di sini, lagi-lagi, laporan survei harus memuat keterangan yang jelas bagaimana peneliti memperlakukan *nonresponse*.

Ada berbagai macam metode analisis data yang dapat digunakan oleh peneliti, dan saat ini telah tersedia berbagai perangkat lunak yang dapat membantu peneliti dalam melakukan tugasnya. Hal penting dalam analisis data bukan pada seberapa kompleks metodenya, tapi seberapa tepat metode yang digunakan bisa menjawab seluruh pertanyaan atau tujuan penelitian. Dan untuk itu dibutuhkan keahlian dari berbagai bidang.

Secara umum, kualitas sebuah survei sangat ditentukan oleh kualitas peneliti. Jika survei dilakukan oleh peneliti yang memenuhi kualifikasi, maka hasil survei bisa diandalkan. Keahlian atau kapabilitas peneliti hanya salah satu syarat. Syarat lainnya—dan mungkin lebih krusial—adalah integritas peneliti: jujur, satu dalam ucapan dan perbuatan.

“ Secara umum, kualitas sebuah survei sangat ditentukan oleh kualitas peneliti. Jika survei dilakukan oleh peneliti yang memenuhi kualifikasi, maka hasil survei bisa diandalkan. Keahlian atau kapabilitas peneliti hanya salah satu syarat. Syarat lainnya— dan mungkin lebih krusial— adalah integritas peneliti: jujur, satu dalam ucapan dan perbuatan.”

¹¹cc Imputasi adalah proses mengganti data hilang (item *nonresponse*) dengan nilai-nilai tertentu.

Daftar Pustaka

- Cochran, W.G. (1977). *Sampling Techniques, 3rd ed.* New York: John Wiley & Sons Inc.
- Kish, L. (1965). *Survey Sampling.* New York: John Wiley & Sons Inc.
- LSI (Lembaga Survei Indonesia). (2018). “Tren Demokrasi Publik tentang Demokrasi, Korupsi, dan Intoleransi (Temuan Survei Nasional 1-7 Agustus 2018).” Laporan Survei.
- SMRC (SAIFULMUJANI Research & Consulting). (2017). “NKRI dan ISIS Penilaian Massa Publik Nasional (Temuan Survei Mei 2017).” Laporan Survei.
- Scheaffer, R.L., Mendenhall, W., Ott, L., dan Gerow, Kenneth. (1996). *Elementary Survey Sampling, 5th ed.* Belmont, Calif [u.a.]: Duxbury Press.
- Weisberg, H.F. 2005. *The Total Survey Error Approach: A Guide to The New Science of Survey Research.* Chicago: University of Chicago Press.

Pengalaman Indonesia dalam Melakukan Riset Terkait *Violent Extremism*



Oleh :

Arya Fernandes

Riset terkait *violent extremism* masih relatif baru dilakukan di Indonesia. Tema-tema penelitian banyak berkaitan dengan aspek-aspek, seperti intoleransi, deradikalisasi, dan terorisme. Pada umumnya, riset terkait tema intoleransi dan deradikalisasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui serangkaian observasi melalui *focus group discussion* (FGD), wawancara mendalam, atau etnografi. Sementara, pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei opini publik.

Penggunaan metode FGD untuk meriset tema-tema yang sensitif masih relevan digunakan untuk mendalami aspek 'how' dan 'why' terhadap tema penelitian yang tengah dilakukan. Dalam proses pelaksanaan FGD, untuk menghindari sikap responden yang tertutup, proses perekrutan responden harus dilakukan dengan terukur. Misalnya, dengan menetapkan terlebih dahulu kriteria responden yang tepat untuk tema penelitian dan meminta persetujuan responden sebagai peserta (*legal consent*). Peneliti juga harus membangun kepercayaan dengan responden dengan menjelaskan tujuan dari penelitian tersebut dan latar belakang lembaga yang melaksanakan FGD. Peneliti juga harus menyampaikan kepada responden bahwa mereka dapat secara terbuka menyampaikan pendapatnya tanpa khawatir akan mendapatkan intimidasi atau konsekuensi apa pun dari pernyataannya. Selain itu, peneliti harus memastikan adanya *privacy* dari responden, dengan menyampaikan bahwa dalam proses penulisan laporan penelitian: nama dan atribusi responden tidak ditulis secara lengkap.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif seperti FGD bisa dilakukan sebelum atau setelah proses penelitian kuantitatif, seperti survei. Sebelum pelaksanaan survei, FGD bisa digunakan untuk menyusun kerangka pertanyaan survei. Sementara setelah proses pelaksanaan survei, FGD dapat dilakukan untuk mendalami atau mengonfirmasi hasil survei.

Sejak tahun 2017, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) bersama beberapa lembaga melakukan penelitian terkait tema-tema sensitif. Pada tahun 2017, bersama dengan Wahid Institute, CSIS meneliti potensi intoleransi dan radikalisme di kalangan perempuan. Pada tahun 2018, CSIS bersama International Republican Institute (IRI) melakukan riset mengenai pandangan dan sikap partai politik, organisasi massa Islam, dan masyarakat biasa terkait intoleransi, radikalisme, dan demokrasi.

Sama dengan pendekatan FGD, penelitian kuantitatif menggunakan survei opini publik terkait tema sensitif, seperti *violent extremism*, juga memiliki tingkat kesukaran yang berbeda dibandingkan penelitian dengan tema sosial lainnya. Kesukaran terjadi karena adanya potensi responden yang tidak bersedia menyampaikan persepsi dan sikapnya secara terbuka atau adanya kesalahan dalam merumuskan pengukuran dan pertanyaan riset. Untuk meniasati hal tersebut, proses perancangan instrumen survei (kuesioner) harus benar-benar netral dan berdasarkan pada peristiwa yang telah atau tengah terjadi. Para pengumpul data lapangan juga harus diberi pelatihan tentang bagaimana melakukan proses wawancara dengan baik. Sementara, untuk memudahkan responden, survei dilengkapi dengan kartu bantu survei.

Tulisan ini membahas bagaimana pengalaman lembaga penelitian di Indonesia melakukan penelitian terkait tema *violent extremism* yang dilihat dari beberapa aspek, di antaranya: (1) bagaimana lembaga tersebut merumuskan tujuan dan pertanyaan penelitian; (2) merumuskan desain riset; (3) metode pengumpulan data; dan (4) membuat temuan dan rekomendasi penelitian.

Metode Kualitatif

Dalam proses pelaksanaan FGD, penentuan terget peserta disesuaikan dengan tema dan kapasitas peserta. Pengalaman CSIS misalnya, untuk mengetahui jejaring dan struktur, aktor dan motivasi, serta faktor pendorong dan penarik

“ Proses pembuatan pertanyaan kunci penelitian akan menentukan sukses atau gagalnya penelitian tersebut. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan, misalnya menentukan terlebih dahulu hal-hal apa yang ingin dilihat dari penelitian tersebut, masalah yang tengah diteliti, dan alasan mengapa hal tersebut penting untuk diteliti lebih lanjut.”

yang memengaruhi seseorang terlibat dalam organisasi radikal, CSIS menggunakan pendekatan *targeted group*. Jadi responden dikelompokkan berdasarkan keterlibatan dalam organisasi keagamaan mereka. Hal tersebut ditujukan agar responden dapat secara terbuka menyampaikan pendapatnya.

Beberapa contoh penelitian di bawah ini

dapat digunakan sebagai bahan saat merancang desain riset. Pada tahun 2017 CSIS bekerja sama dengan Wahid Institute melakukan riset mendalam tentang potensi intoleransi dan radikalisme di kalangan perempuan di Indonesia. Riset dilakukan di 10 kabupaten/kota di Indonesia melalui FGD dan wawancara mendalam.¹ Sebanyak 358 narasumber yang terdiri dari mantan narapidana terorisme, pejabat pemerintah, aktivis organisasi masyarakat, serta komunitas perempuan diwawancarai. FGD juga dilakukan pada organisasi-organisasi perempuan dan organisasi kemasyarakatan.

Penelitian tersebut hendak menjawab empat pertanyaan kunci, yakni, *pertama*, sejauh mana kebijakan di tingkat nasional dan lokal mendukung atau tidak mendukung peran perempuan dalam mencegah ekstremisme? *Kedua*, bagaimana peta umum jejaring aktor dan kelompok perempuan intoleran dan radikal? *Ketiga*, apa sajakah faktor-faktor kunci yang mendorong keterlibatan perempuan dalam kelompok esktremis dan sekaligus upaya pencegahannya? Dan *keempat*, bagaimana inisiasi dan usaha-usaha pencegahan dilakukan aktor dan komunitas lokal, termasuk kegiatan ekonomi, dan bagaimana dampaknya? Proses pembuatan pertanyaan kunci penelitian akan menentukan sukses atau gagalnya penelitian tersebut. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan, misalnya menentukan terlebih dahulu

¹ Riset dilakukan di Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Solo, Klaten, dan Sukoharjo; Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Sumenep.

hal-hal apa yang ingin dilihat dari penelitian tersebut, masalah yang tengah diteliti, dan alasan mengapa hal tersebut penting untuk diteliti lebih lanjut.

Riset CSIS dan Wahid Institute (2017) menjelaskan bagaimana perbedaan pandangan antara kelompok moderat dan radikal terhadap prinsip-prinsip demokrasi, seperti pandangan dan sikap terhadap pluralisme, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dukungan terhadap demokrasi dan pemilu. CSIS dan Wahid Institute membedakan konsep radikalisme dan intoleransi. Radikalisme dipahami sebagai sikap dan gerakan yang ingin mengubah sistem politik melalui cara-cara ekstrem-revolusioner. Sementara, intoleransi didefinisikan sebagai sikap, tindakan, dan kepercayaan yang tidak bisa menerima ajaran dan perilaku kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan kelompoknya sendiri.

Fokus riset yang dilakukan CSIS adalah potensi radikalisme dan intoleransi di kalangan perempuan. Riset ini menggali motivasi seseorang bergabung dalam organisasi radikal, seperti munculnya “titik jenuh” ketika gagal dalam memaknai hidup lalu bergeser dengan mendalami agama, dan mendapatkan interpretasi ajaran-ajaran agama yang intoleran dan radikal. Motivasi lainnya adalah soal iming-iming ekonomi yang ditawarkan oleh organisasi radikal. Biasanya ini terjadi pada kelompok perempuan yang secara ekonomi lemah. Riset juga menemukan bahwa pandangan intoleransi dan radikal dipengaruhi oleh relasi personal, terutama keluarga dan khususnya suami. Sementara dari sisi medium informasi, kelompok perempuan yang terdampak radikalisasi mendapatkan informasi melalui internet dan media sosial.

Pada segmen populasi lainnya, pada tahun 2017, CSIS bersama IRI melaksanakan riset untuk menggali pandangan pada tiga aktor utama: partai politik, organisasi massa Islam, dan masyarakat biasa terhadap intoleransi dan radikalisme serta demokrasi. Riset dilakukan di Jawa Barat dengan melakukan serangkaian FGD untuk melihat apakah dinamika politik lokal, seperti menguatnya intoleransi dan radikalisasi, memengaruhi hasil dari pelaksanaan Pilkada Serentak pada 2018 dan pemilu nasional di tahun 2019?

Dalam riset tersebut, radikalisasi dibedakan dalam dua kategori, yaitu tindakan radikal (*violent extremist* dan *non-violent*) dan kognisi radikal (mendukung kekerasan dan tidak mendukung kekerasan). Pendekatan yang dilakukan dalam riset tersebut tidak melihat faktor global, meso (nasional/subnasional), dan mirco (individu) yang mendorong terjadinya tindakan

radikal, tetapi melihat *local drivers* yang bisa memengaruhi sikap dan pandangan terhadap tindakan radikal. Untuk melihat faktor lokal tersebut, FGD dilakukan dengan mengelompokkan responden pada empat segmen yang berbeda, yaitu masyarakat biasa, organisasi moderat Islam, organisasi konservatif Islam, dan organisasi mahasiswa yang konservatif. Sementara dua grup mewakili partai berbasis nasional dan partai berbasis Islam. Penentuan variasi 'ideologi' responden, seperti moderat dan konservatif, mengacu pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan.

Dalam riset tersebut, terdapat perbedaan pandangan antara partai berbasis Islam dan organisasi Islam konservatif dengan partai berbasis nasional dan organisasi Islam moderat tentang demokrasi, hak minoritas dan perempuan, serta tentang hubungan pemerintahan dengan pemilih Islam. Dukungan terhadap demokrasi dan kebebasan memilih pemimpin berdasarkan pengalaman, integritas, dan kemampuan cukup kuat disampaikan oleh responden yang berasal dari partai berbasis nasional dan organisasi Islam moderat. Pendapat yang berbeda disampaikan oleh responden yang berasal dari partai dan organisasi Islam konservatif. Responden dari kategori ini secara umum tidak percaya pada *outcome* dari demokrasi. Mereka juga tidak dapat menerima pemimpin dari kelompok minoritas dan perempuan. Selain itu, kalangan konservatif juga berpandangan bahwa pemerintahan hendaknya lebih mengakomodasi kepentingan-kepentingan pemilih Islam, atau menjadi lebih islami.

Secara umum, terkait metode kekerasan dalam mempertahankan agama, sebagian peserta, baik yang moderat maupun yang konservatif, menolak penggunaan cara-cara kekerasan dalam mempertahankan Islam walaupun ada sebagian kecil yang mendukung cara-cara kekerasan dalam mempertahankan agama. FGD juga menemukan ekspresi ketidakadilan menjadi sumber kerentanan yang potensial menyebabkan terjadinya sikap intoleransi dan *violent extremism*.

Dalam bentuk lain, penelitian untuk menguji pengaruh identitas sosial dalam memprediksi dukungan terhadap kelompok teroris dilakukan oleh Yustisia dkk (2018). Penelitian tersebut mengukur beberapa konstruk, seperti identitas sosial, ketidakadilan, efikasi kelompok, persepsi terhadap ancaman, kontak dalam kelompok, dan hubungannya dengan dukungan terhadap kelompok teroris. Penelitian tersebut ingin menguji pengaruh

Encapsulate Model of Social Identity in Collective Action (EMSICA) dalam konteks dukungan terhadap gerakan teroris. Riset mewawancarai 66 tahanan (napi teroris) yang tersebar di 7 penjara yang telah ditahan dalam kurun 1 sampai 10 tahun dengan berbagai kasus, seperti pembuatan bom, melindungi pimpinan teroris, terlibat dalam pelatihan militer, penjualan senjata ke kelompok jihadis, pencurian, dan lainnya. Riset tersebut menemukan bahwa faktor identitas sosial dan perasaan ketidakadilan adalah dua faktor utama yang memengaruhi dukungan terhadap gerakan teroris.

Dalam penelitian tersebut, identitas sosial diukur dengan meminta responden menentukan sikap mereka terhadap kelompok jihadis pada tiga item (misalnya, saya mau berpartisipasi dalam melakukan jihad untuk membela kejayaan Islam, saya merasa senang menjadi bagian dari mujahidin, saya merasa dekat dengan pimpinan mujahidin yang membela Islam, walaupun mereka dicap teroris oleh Barat).

Perasaan ketidakadilan diukur melalui beberapa aspek kognitif dari ketidakadilan, seperti pandangan tentang deprivasi ekonomi dan kesenjangan sosial-politik, baik di Indonesia maupun di tempat lain (di Indonesia misalnya dengan menanyakan apakah kondisi ekonomi masyarakat muslim lebih buruk dibandingkan non-muslim), muslim diperlakukan tidak adil oleh pemeluk agama lain, suara kelompok minoritas lebih berpengaruh dibandingkan muslim, dan sebagainya. Pengukuran dilakukan melalui skala 1 sampai 4 (1 = sangat tidak setuju dan 4 = sangat setuju).

Untuk melihat faktor yang memengaruhi sikap dan tindakan radikal, penelitian tersebut juga melihat interaksi seseorang dengan orang tetangga yang berbeda atau orang dari agama yang berbeda). Pengukuran dilakukan dengan melihat frekuensi (skala 1 sampai 4 di mana 1 = sangat jarang dan 4 = sangat sering). Selain itu, pengukuran terhadap efikasi kelompok dilihat dari pandangan responden terhadap efektivitas penggunaan kekerasan dalam jihad. Sementara, perasaan keterancaman dilihat dari pengaruh demokrasi Barat dan nilai-nilai sekuler terhadap Islam, dan dukungan terhadap kelompok teror dilihat dari sikap terhadap penggunaan kekerasan dalam menegakkan syariat Islam.

Studi dengan menasar *target group* serupa juga dilakukan oleh CSIS pada tahun 2018. Dalam penelitiannya, CSIS mewawancarai para pentolan aktivis Aksi Bela Islam 212 dan para anggota partai politik dan organisasi

kemasyarakatan. Dari serangkaian wawancara mendalam ditemukan bahwa motivasi gerakan 212 adalah kombinasi politik dan agama (*hybrid*) yang terjadi beriringan.

Temuan studi tersebut kemudian didalami dalam penelitian kuantitatif dengan melihat tingkat pengenalan publik terhadap 212, dukungan, prerefensi politik massa pendukung, dan sebagainya. Dari sisi aktor dan jejaring, penelitian CSIS (2018) menemukan bahwa peserta 212 berasal dari variasi ideologi dari massa moderat sampai konservatif hingga radikal. Mulai dari peserta yang berlatar NU dan Muhammadiyah hingga yang berafiliasi ke Jama'ah an-Sharut Tauhid. Peserta 212 juga berasal dari partai-partai berbasis nasional dan partai Islam. Dari sisi motivasi, gerakan tersebut selain memiliki motivasi politik dalam Pilkada DKI Jakarta dan motivasi politik nasional dengan mengkritisi kepemimpinan Jokowi, juga memiliki motivasi lain, seperti permintaan tindakan hukum terhadap Ahok. Sementara dari survei opini publik, temuan kualitatif tersebut terkonfirmasi oleh survei CSIS di 5 provinsi di Indonesia. Survei menunjukkan adanya variasi peserta Aksi Massa 212, baik dari preferensi politik maupun afiliasi keagamaan.

Metode Kuantitatif

Survei opini publik dapat menjadi pilihan untuk melihat sikap dan perilaku publik secara umum terhadap radikalisme dan *violent extremism*. Survei yang menggunakan metode *probability sampling* mempunyai kekuatan karena dapat digeneralisasi pada level populasi. Dalam *probability sampling*, semua individu di dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai responden. Di Indonesia, pendekatan survei opini publik mengalami pertumbuhan cukup pesat, terutama menjelang Pemilu 2004. Sejak 2004 sampai 2014, riset politik dan pemilu, baik melalui survei maupun *quick count* (hitung cepat) yang dilakukan

“ Survei yang menggunakan metode *probability sampling* mempunyai kekuatan karena dapat digeneralisasi pada level populasi. Dalam *probability sampling*, semua individu di dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai responden.”

oleh lembaga survei yang kredibel, berhasil memprediksi pemenang pemilu presiden. Namun, dalam pengalaman lembaga-lembaga survei di Indonesia, riset-riset opini publik terkait isu radikalisme dan *violent extremism* masih belum sekuat riset politik dan pemilu.

Nanes dan Lau (2018) menjelaskan bahwa desain survei *violent extremism* sebaiknya dilakukan dengan mengukur *violent extremism* berdasarkan peristiwa, tingkat partisipasi dan sikap, serta faktor pemicunya. Faktor pemicu terjadinya *violent extremism* bisa berasal dari pengaruh psikologi dan sosial, identitas sosial, politik, dan ekonomi.

Menurut Nanes dan Lau, pengukuran terhadap sikap dan perilaku dapat dilakukan melalui beberapa aspek di bawah ini:

1. Pengukuran berdasarkan peristiwa. Pengukuran dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tindakan kekerasan (fisik) dan tindakan tanpa kekerasan, seperti ujaran kebencian.
2. Pengukuran berdasarkan tingkat partisipasi dalam melakukan tindakan kekerasan, yang dibedakan antara partisipasi aktif dan pasif. Tipe partisipasi dibedakan juga melalui dukungan material dan dukungan ideologi. Dalam partisipasi aktif, dukungan material dilakukan dengan memberikan bantuan, mendukung kombatan, dan terlibat dalam aksi protes. Dukungan ideologi dilakukan dengan menunjukkan dukungan terhadap agenda-agenda kelompok ekstremis. Adapun dalam partisipasi yang pasif, dukungan material dilakukan dengan menolak memberikan informasi tentang aktivitas kelompok ekstremis, dan dukungan ideologi ditunjukkan dengan bersimpati pada agenda ekstremis dan menolak kebebasan beragama
3. Pengukuran berdasarkan sikap terhadap *violent extremism* dan sikap terhadap *non-violence*, yang bisa dilihat dari sikap terhadap toleransi dan intoleransi.

“**Desain survei violent extremism sebaiknya dilakukan dengan mengukur violent extremism berdasarkan peristiwa, tingkat partisipasi dan sikap, serta faktor pemicunya.**”

~ Nanes dan Lau (2018) ~

Dari sisi respons publik terhadap tindakan kekerasan dan non-kekerasan berdasarkan peristiwa, temuan survei CSIS pada tahun 2019 menunjukkan secara umum, modal sosial publik, seperti kesaling-percayaan, toleransi, dan keberagaman serta dukungan terhadap demokrasi masih tinggi. Secara umum, mayoritas publik menolak penggunaan kekerasan untuk mengekspresikan pandangan keagamaan. Meskipun modal sosial publik tinggi, aktivasi modal sosial di tingkat publik masih belum terjadi. Publik 'tidak berdaya' atau belum merespons secara kuat bila ada tindakan-tindakan yang intoleran terjadi.

Pendekatan lain untuk melihat pemicu dari tindakan radikal dan *violent extremism* juga dibuat oleh United Nations Development Programme (UNDP). UNDP (2016) menjelaskan delapan hal yang dapat menjadi pemicu tindakan radikal dan *violent extremism*, di antaranya (1) peran dan pengaruh politik global; (2) situasi ekonomi yang tertutup dan terbatasnya kesempatan kerja; (3) situasi politik yang tertutup dan terbatasnya partisipasi dalam politik; (4) adanya ketidakadilan dan korupsi; (5) ketidakpuasan dan penolakan terhadap sistem politik dan sosial ekonomi; (6) penolakan terhadap keberagaman di masyarakat; (7) pemerintahan yang lemah; dan (8) perubahan kondisi global dan banalisasi kekerasan di media.

Model UNDP salah satunya diaplikasikan dalam survei opini publik terhadap anak muda yang berusia 15 sampai 30 tahun di Serbia dengan 2.600 sampel, yang dilakukan oleh CeSID. Temuan CeSID (2016) menunjukkan faktor regional memengaruhi perilaku dan sikap anak muda terhadap tindakan radikal dan *violent extremism*. Dari delapan pemicu, kecenderungan umum yang terjadi di tiga regional tersebut adalah tindakan kekerasan dilatarbelakangi karena penolakan terhadap keberagaman di masyarakat.

Penelitian lain dilakukan oleh DAI dan USAID (2018) di Mindanao, Filipina, terhadap 2.342 sampel yang berusia 15-29 tahun. Hasil penelitian menunjukkan beberapa pemicu yang secara statistik signifikan dalam memengaruhi dukungan terhadap kekerasan dan ide-ide ekstremis, di antaranya perasaan termarginalkan, kepercayaan bahwa Islam tengah diserang, dukungan untuk melakukan balas dendam, dan perasaan terisolasi. Sementara, faktor-faktor seperti korupsi, pelanggaran HAM, kemiskinan, pengangguran, dan ketidakpercayaan pada pemerintah secara statistik sangat lemah hubungannya dalam memengaruhi tindakan radikal.

Di Indonesia, secara umum, model-model penelitian yang dilakukan terkait *violent extremism* banyak menasar persepsi populasi umum, yaitu mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah saat survei dilakukan. Namun, dalam perkembangan, beberapa lembaga penelitian menggunakan pendekatan dengan melakukan wawancara dengan sub-populasi, seperti guru dan murid di sekolah. Sejauh ini, sepertinya belum terdapat survei yang dilakukan terhadap sub-populasi khusus, terutama mereka yang terpapar ide kekerasan, radikalisme, dan terorisme.

Pada tahun 2005, survei skala nasional dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan tema “Dukungan dan Penolakan terhadap Radikalisme Islam”. Survei tersebut menguji pendapat responden tentang pandangan-pandangan keagamaan seorang muslim, seperti pernikahan beda agama, rajam, pembagian hak waris, hak perempuan menjadi presiden, bunga bank, poligami, dan hukum potong tangan. Penelitian tersebut juga melihat tingkat persetujuan responden terhadap pelaksanaan bom bunuh diri terhadap sasaran sipil untuk membela agama dari musuh-musuhnya. Jawaban menggunakan skala 1 sampai 4, yakni “selalu dapat dibenarkan”, “sering dapat dibenarkan”, “kadang-kadang dibenarkan”, dan “tidak dapat dibenarkan sama sekali”.

Temuan survei nasional LSI menunjukkan tingkat persetujuan publik terhadap ide-ide syariah masih cukup tinggi, tapi tidak selaras dengan dukungan publik terhadap partai yang memperjuangkan dilaksanakannya syariah Islam di Indonesia. Survei juga menemukan tingkat penerimaan publik masih tinggi terhadap organisasi Islam moderat, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Sementara, untuk melihat motivasi dan sikap publik terhadap agenda-agenda radikal, dalam beberapa survei opini publik, CSIS (2012) mengukurnya melalui beberapa pengukuran, seperti tingkat kepuasan dalam menjalani kehidupan, interaksi dan frekuensi berhubungan dengan orang yang berbeda agama, dan apakah memiliki keluarga, teman, lingkungan yang berbeda agama dan suku. Pada tahun 2018, temuan survei nasional CSIS menunjukkan interaksi dengan orang yang berbeda agama membentuk pandangan radikal seseorang. Seseorang dengan tingkat interaksi yang rendah dengan orang yang berbeda memiliki kecenderungan lebih tinggi terpapar ideologi radikal.



Model penelitian yang berbeda dengan menyasar sub-populasi khusus, terutama guru dan murid, dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018. Penelitian tersebut secara umum hendak

menjawab tiga pertanyaan kunci, yakni seberapa besar tingkat intoleransi guru sekolah/madrasah di Indonesia, seberapa besar tingkat radikalisme guru sekolah/madrasah di Indonesia, dan faktor-faktor apa saja yang memberikan kontribusi pada intoleransi dan radikalisme guru di Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, survei PPIM mengukur tiga aspek, yaitu intoleransi, radikalisasi, dan faktor yang memengaruhi intoleransi dan radikalisasi. Survei tersebut menggunakan tiga alat ukur, yaitu kuesioner *self-report computer assisted instruction, implicit association test* (IAT-Intoleransi), dan *implicit association test* (IAT-Radikalisme). Dari sisi metodologi, survei dilakukan pada 2.237 guru muslim yang tersebar secara proporsional berdasarkan jumlah guru di 34 provinsi. Unit analisis dilakukan pada guru TK/ sederajat, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat. Dari sisi sekolah, proses pengacakan dilakukan mengacu pada status sekolah: negeri/swasta.

Survei PPIM menemukan sebagian besar guru di Indonesia memiliki opini radikal dan opini intoleran yang tinggi. Faktor pandangan keislaman yang “sempit” membentuk pandangan radikal dan intoleran tersebut, seperti Islam adalah satu-satunya solusi dalam mengatasi semua persoalan dan tidak perlunya mempelajari ilmu pengetahuan yang berasal dari Barat.

Proses Pelaksanaan Survei *Violent Extremism*

Pada tahun 2019, CSIS menggunakan desain baru untuk mengukur sikap publik terhadap isu-isu sensitif, terutama bagaimana pandangan publik menyikapi tindakan kekerasan dan non-kekerasan berbasis agama.

Pengukuran dilakukan berdasarkan peristiwa yang telah terjadi. Untuk melihat sikap responden, pertanyaan dibagi dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, responden ditanya mengenai pengetahuan terkait tindakan-tindakan yang telah terjadi. Pada tahap kedua, bagi responden yang mengetahui peristiwa tersebut diberikan pertanyaan lanjutan untuk mengetahui sikap responden terhadap motif tindakan kekerasan dan non-kekerasan tersebut. Pada tahap ketiga, ditanyakan bagaimana sikap responden terhadap cara pelaku tindakan kekerasan dalam melakukan aktivitasnya. Untuk mengetahui motif dan cara pelaku melakukan tindakan kekerasan dan non-kekerasan, kami menelusurinya melalui sumber-sumber resmi, seperti media massa, dengan melihat pertanyaan langsung pelaku atau pernyataan dari organisasi terkait. Bila tidak ditemukan, kami menelusurinya melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh otoritas keamanan yang berwenang, seperti kepolisian dan lainnya. Dalam pengalaman kami di lapangan, model pertanyaan tersebut dapat menghindari kemungkinan responden untuk menghindari pertanyaan tersebut.

Contoh Formulasi Pertanyaan terkait Bom WTC 9/11

Pengenalan: Pada tanggal 11 September tahun 2001 terjadi serangkaian serangan bunuh diri yang dilakukan Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden di Menara Kembar World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat. Apakah Ibu/Bapak pernah mendengar/mengetahui rangkaian aksi bom tersebut? (Pernah mendengar, Tidak pernah mendengar)

Sikap terhadap Motif: Al Qaeda menyatakan bahwa motif pengeboman WTC adalah merupakan reaksi atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yakni dukungan terhadap Israel, keberadaan tentara AS di Arab Saudi, sanksi AS terhadap Irak. Bagaimana sikap bapak/ibu terhadap MOTIF pengeboman tersebut? (Setuju, tidak setuju)

Sikap terhadap Cara: Apakah Bapak/Ibu setuju/tidak setuju dengan CARA Al-Qaeda melakukan serangan bunuh diri terhadap menara kembar World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat tersebut? (Setuju, Tidak Setuju)

Proses perancangan disain riset mulai dari pembuatan instrumen dan uji coba alat ukur, metode penarikan sample (sampling), pengumpulan data, dan analisis telah disampaikan oleh penulis lain pada bagian sebelumnya.

Bagian ini menuliskan hal-hal teknis yang perlu diperhatikan saat melakukan survei di lapangan.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan survei opini publik, terutama survei dengan tema sensitif seperti *violent extremism*, salah satunya ditentukan oleh proses pengumpulan dan kualitas dari data yang dihasilkan. Survei bisa mengalami kegagalan karena disebabkan oleh ketidakpahaman enumerator dan responden terhadap pertanyaan dan bisa juga terjadi karena tingginya angka penolakan responden terhadap survei.

Untuk melakukan survei, proses perekrutan enumerator dan *quality control* perlu dilakukan secara matang dan terencana. Proses tersebut meliputi memperhatikan latar belakang dan kompetensi enumerator yang direkrut, serta memastikan adanya kontrak kerja antara pelaksana survei dengan enumerator yang dilakukan secara transparan. Dari sisi latar belakang, enumerator sebaiknya direkrut dari masyarakat yang berasal dari lokasi penelitian sehingga dapat memudahkan enumerator berinteraksi dengan responden. Dari sisi kompetensi, enumerator harus mendapatkan pelatihan mengenai proses pelaksanaan survei, seperti bagaimana melakukan penarikan sampel dan wawancara. Sementara, kontrak kerja antara enumerator dan lembaga survei juga harus disepakati secara bersama. Kontrak kerja harus memuat apa saja kewajiban dan hak yang akan diterima enumerator. Begitu juga, hukuman/sanksi yang akan diterima enumerator bila gagal atau berbuat curang, misalnya dengan mewajibkan enumerator mengumpulkan kembali data di lapangan atau mengembalikan honor yang telah diterima, lalu memilih enumerator baru.

Dari sisi pelaksanaan *quality control*, proses kendali kualitas harus dilakukan secara berlapis. Pelaksana survei dapat memonitor kerja enumerator melalui GPS yang terkoneksi ke data center, atau meminta enumerator untuk mengshare lokasinya melalui aplikasi WA. Setelah data dikumpulkan, lembaga survei dapat kembali memverifikasi data survei dengan melakukan *spot-check* terhadap responden terpilih secara acak, dan memvalidasi kembali data dengan menghubungi responden secara acak.

Pada tahap pelaksanaan wawancara lapangan, sebelum survei dilakukan perlu juga dilakukan *pretest* untuk melihat apakah pertanyaan yang ditanyakan sudah mampu menjawab hipotesis yang diajukan dalam survei dan apakah kuesioner dapat dipahami dengan mudah oleh enumerator dan

responden. Dalam menyusun kuesioner, sebaiknya dihindari pertanyaan yang bisa menimbulkan perdebatan. Misalnya terkait sikap publik terhadap tindakan kekerasan, dapat menyiasatinya dengan menurunkan formulasi pertanyaan, seperti menanyakan pengenalan responden terhadap peristiwa kekerasan, sikap terhadap motif dan tujuan. Dalam instrumen survei juga perlu dipisahkan antara responden yang tidak mau menjawab dan responden yang tidak tahu.

Sementara, sebelum memulai pertanyaan, enumerator diharapkan meminta persetujuan responden terlebih dahulu untuk diwawancarai. Sementara, untuk mengurangi tingginya angka *non-response*, terutama terhadap pertanyaan yang sensitif, lembaga survei dapat memanfaatkan aplikasi yang telah di-*install* di tablet atau telepon genggam dan meminta responden untuk menggunakannya. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, responden bisa lebih nyaman dalam menjawab, tanpa merasa risih bila enumerator mengetahui jawabannya, dan dapat mengurangi kekhawatiran responden diasosiasikan dengan kelompok tertentu.

Dari sisi pengumpulan data, untuk mempercepat proses pengumpulan data di lapangan, pelaksana survei bisa memanfaatkan aplikasi yang sudah di-*install* di tablet atau telepon genggam. Sebaiknya peneliti juga harus meminta kepada enumerator untuk mengirimkan data kuesioner ke pusat. Untuk memastikan validitas data yang sudah diinput di aplikasi, peneliti dapat juga mengecek kembali secara acak antara bukti fisik dan data yang ada di aplikasi.

Penutup

Kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif (*mixed-method*) dalam riset *violent extremism* perlu dipertimbangkan. Hal itu terjadi karena adanya kompleksitas isu, penerimaan responden saat riset dilakukan, dan pelaksanaan riset yang sensitif bila dibandingkan riset-riset terkait politik dan elektoral. Kombinasi metodologi juga dapat mempercepat riset terkait *violent extremism*.

Daftar Pustaka

- Centre for Strategic and International Studies dan Wahid Institute. (2017). *Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan*.
- Centre for Strategic and International Studies. (2012). *Modal Sosial, Toleransi dan Demokrasi*. Laporan Survei Nasional.
- Centre for Strategic and International Studies (2017). *Violent Extremism in Indonesia: Radicalism, Intolerance and Elections*.
- Centre for Strategic and International Studies (2018). *Kovergensi: Membedah Sifat Hibrida dari Aksi Bela Islam*.
- Centre for Strategic and International Studies. (2018). *Persepsi Sosial Kemasyarakatan di Lima Provinsi di Indonesia*. Laporan Survei.
- CeSID. (2016). *Survey of the Drivers of Youth Radicalism and Violent Extremism in Serbia*.
- DAI. (2018). *Youth and Violent Extremism in Mindanao, Philippines, A Mixed-Methods Design for Testing Assumptions about Drivers of Extremism*.
- Lembaga Survei Indonesia. (2015)., *Dukungan dan Penolakan terhadap Radikalisme Islam. Survei Nasional*.
- Nanes, Matthew and Lau, Bryony. (2018). *Surveys and Countering Violent Extremism, A Practitioner Guide*, The Asia Foundation.
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta dan Convey Indonesia. (2018). *Pelita yang Meredup, Potret Keberagamaan Guru di Indonesia*. Laporan Survei Nasional.
- UNDP. (2016). *Preventing Violent Extremism Through Promoting Inclusive Development, Tolerance and Respect for Diversity, A Development Response to Addressing Radicalization and Violent Extremism*.
- Yustisia, W., Milla, M.N., Shadiqi, M.A., dan Muluk, H. (2018). *An Investigation of Encapsulate Model of Social Identity in Collective Action and Intergroup Contact to Understand Support for Islamist Terrorism*.

(Footnotes)

- 1 Groves, R. M., Fowler Jr, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2011). *Survei Methodology* (Vol. 561). John Wiley & Sons.

Indonesia menghadapi situasi yang tidak mudah dalam mengurangi tindakan kekerasan ekstrem (*counter violent extremism*) berbasis agama dan perilaku intoleran terhadap kelompok minoritas. Dalam catatan *Freedom House* (2018), salah satu faktor penting yang memengaruhi penurunan rating demokrasi Indonesia pada skala global adalah tingginya angka diskriminasi pada kelompok yang berbeda dan minoritas. Survei opini publik mengenai hal ini menjadi penting karena dapat menjadi bahan bagi pembuat kebijakan untuk mendiagnosis potensi munculnya tindakan kekerasan ekstrem atau mengevaluasi program-program moderasi dan deradikalasi.

Buku ini lahir atas kerja sama antara Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Proses penulisan buku menjadi rangkaian kegiatan CSIS dan Persepi di tahun 2018, yang dimulai dari pelaksanaan konferensi internasional untuk membahas pendekatan baru dan pengalaman negara lain dalam mengukur *violent extremism*. Hasil konferensi tersebut lalu diuji coba dalam sebuah survei opini publik.

Diharapkan dengan hadirnya buku ini dapat menjadi referensi bagi lembaga penelitian dan universitas dalam melakukan survei terhadap tindakan kekerasan ekstrem, terutama dalam proses pengukuran dan penyusunan pertanyaan. Selain itu, semoga buku ini juga dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat umum untuk melihat perkembangan penelitian terhadap tema *violent extremism*.



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES